

**PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) DALAM ASPEK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(STUDI PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Dita Afrida Tamara
135030107111084



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

- Hari : Kamis
- Tanggal : 03 Agustus 2017
- Jam : 10.00-11.00 WIB
- Skripsi atas nama : Dita Afrida Tamara
- Judul : Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Blitar)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP.19570911 198503 1 003

Anggota

Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA
NIP.198607162014041001

Anggota

Alchmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.S.c
NIP.198704262015041001



Nama Mahasiswa : DITA AFRIDA TAMARA

NIM : 135030107111084

Program studi : Ilmu Administrasi Publik

PENGUJI DAN PEMBIMBING

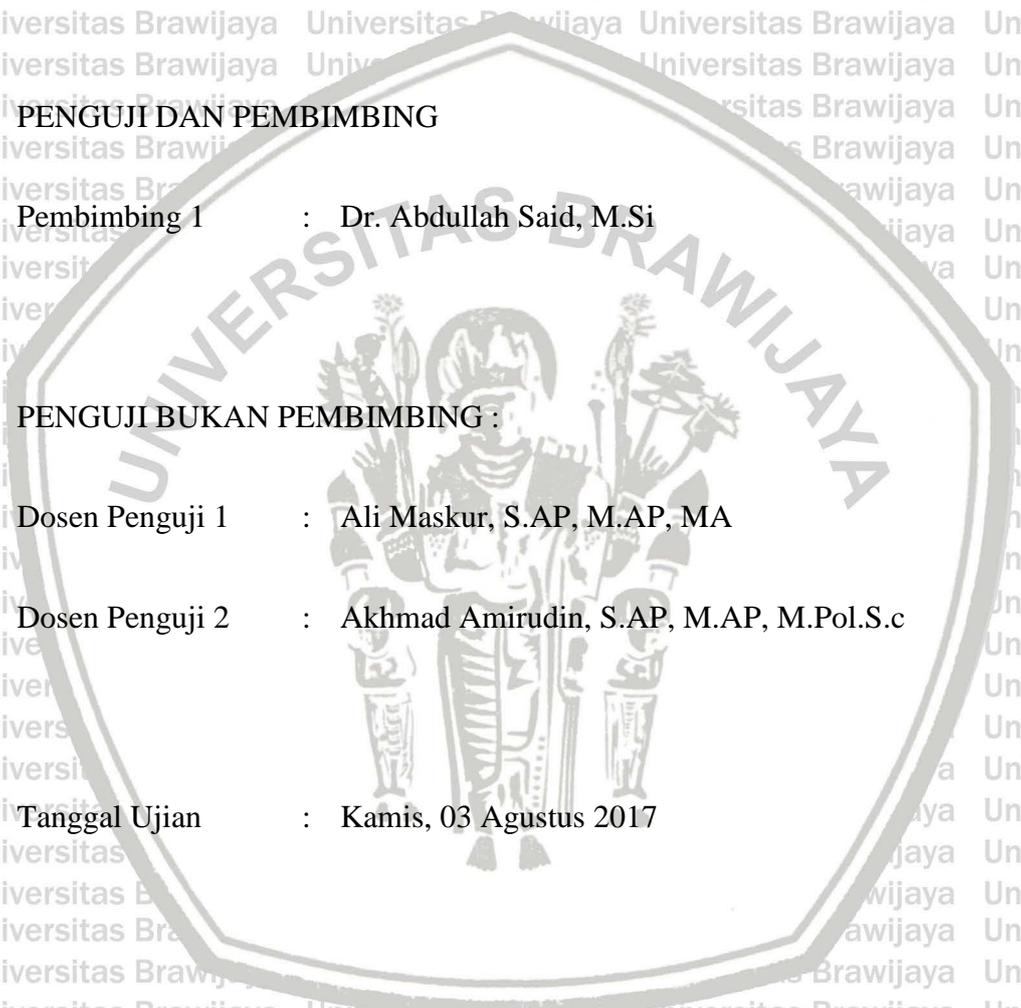
Pembimbing 1 : Dr. Abdullah Said, M.Si

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING :

Dosen Penguji 1 : Ali Maskur, S.AP, M.AP, MA

Dosen Penguji 2 : Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol.S.c

Tanggal Ujian : Kamis, 03 Agustus 2017



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 July 2017



Dita Afrida Tamara

NIM.135030107111084



RIWAYAT HIDUP



Dita Afrida Tamara adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Sujoko dan Widya Nurlisawati sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota

Blitar, Jawa Timur pada tanggal 25 Agustus 1995. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN Kepanjen Kidul III

(lulus tahun 2007), melanjutkan ke SMPN 2 Blitar (lulus tahun 2010), kemudian ke SMAN 1 Blitar (lulus tahun 2013) dan Universitas Brawijaya Malang (*discontinued*), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi dengan program studi Ilmu Administrasi Publik.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat. (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Blitar)”.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sujoko (Ayah) dan Ibu Widya Nurlisawati (Ibu) atas segala dukungan doa dan materi yang tiada henti serta segala motivasi dan kasih sayang yang tidak pernah putus sampai detik ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, Ms selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si dan Bapak Rendra Wismanu, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Chazienul Ulum S.Sos, MPA, selaku selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Ibu Kenyo Anggun selaku Kasubid Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM, dan Perhubungan Bappeda Kota Blitar beserta para staff atas

kesediaan untuk memberikan penjelasan dan data-data selama proses penelitian.

9. Keluarga besar penulis Mama, Papa, Buk Winda, Daffa, Deandra, Imelda, Fadhila, Khanza serta keluarga yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas limpahan doa, kasih sayang dan dukungan terhadap penulis.

10. Redy Styawan, ST untuk segala waktu yang telah diberikan dari pertama kali Ospek sampai sekarang, yang selalu sabar atas segala keluhan yang tiada berujung, serta dukungan yang tidak pernah berhenti.

11. Rizkia Fitriana dan Darabella Voddi Marta Vista sahabat dari SMA sampai kuliah di satu kota yang selalu ada.

12. Kitty (Nova, Maissy, Hevy, Bellanisha, Prita, Ulfa) sahabat selama dikampus dari semester pertama sampe akhirnya bisa lulus tepat waktu semuanya.

13. Teman teman Kosan (Sintya, Tzalist, Rini, Kiki, Nurul) sudah menjadi keluarga selama di Malang berbagi kisah dan motivasi setiap waktu.

14. Teman bernyanyi (Mara, Ade, Bonita, Talita, Apri, Yana, Idris) yang sekarang menjadi sahabat virtual, motivasi terbesar dan tempat cerita terlucu dikala penat dengan drama perkuliahan.

15. Seluruh pihak yang berperan dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

RINGKASAN

Dita Afrida Tamara, 2017. **Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat. (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Blitar)**. Ketua Komisi Pembimbing : Dr. Abdullah Said, M.Si.

Pembangunan adalah proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Penelitian ini menjelaskan mengenai proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas proses penyusunan dokumen perencanaan Kota Blitar serta aktor-aktor yang terlibat dalam prosesnya khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan menurut Miles dan Huberman dan Saldana (2004:12) yaitu 1) Kondensasi Data, 2) Penyajian Data, 3) Penarikan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 sudah berisi tantang aspek kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi nya “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada 2021” yang merupakan lanjutan program jilid kedua dari APBD Pro Rakyat. Visi ini fokus dalam aspek kesejahteraan masyarakat dilihat berdasarkan lima dari enam misinya merupakan strategi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Keterlibatan para aktor sudah cukup baik mulai dari aktor resmi seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif serta aktor tidak resmi seperti masyarakat yang membantu jalannya proses penyusunan RPJMD. Penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dilakukan oleh Bappeda yang mengerjakan sendiri namun melibatkan bantuan dari beberapa akademisi serta aktor-aktor terkait lainnya.

Kata Kunci : *Perencanaan, Perencanaan Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat*

SUMMARY

Dita Afrida Tamara, 2017. **Process of Formulating Medium-Term Development Plans (RPJMD) in the Public Welfare Aspect.** (Study at the Regional Planning and Development Department of Blitar City). Chairman of the Advisory Commission : Dr. Abdullah Said, M.Si.

Development is a process of change towards a better state through a series of planned effort. Based on the mandate of Law, Number 25 Year 2004 regarding National Development Planning System (*SPPN*), both central government and local government are obliged to establish development plans, either for long term (20 years), medium term (5 years) or annual planning. This research portrays the process of preparation of regional mid-term development planning (*RPJMD*) at Blitar City in 2016-2021 concerning Public Welfare Aspects. This study is aimed to discuss the process of drafting the planning documents of Blitar City as well as the actors involved in the process, especially in the aspect of public welfare.

This research applies descriptive research type with qualitative approach. The research was conducted at the Regional Development Planning Department (*BAPPEDA*) of Blitar City and the data collection technique was conducted through interview and documentation. Subsequently, data analysis was done by three stages according to Miles and Huberman and Saldana (2004: 12) namely 1) Data Condensation, 2) Data Presentation, 3) Conclusion.

The results of this study indicate that *RPJMD* of Blitar City Year 2016-2021 has already substantially contained points or aspects of public welfare in accordance with its vision of "Realizing Prosperous Society through *APBD Pro Rakyat* in 2021" which is a follow-up program of the second volume of *APBD Pro Rakyat*. This respective vision focuses on the aspect of public welfare, which is based on five of its six missions in a strategy for realizing public welfare of Blitar City. The involvement of actors is quite good, from official actors such as the executive, legislative, and judiciary as well as unofficial actors such as the community that helps the process of preparing the *RPJMD*. The drafting of *RPJMD* of Blitar City in 2016-2021 was undertaken by *BAPPEDA* itself but involved the help of some academics and other related actors or stakeholders.

Keywords : *Planning, Development Planning, Public Welfare.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Blitar).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan berbagai pihak.

Demi kesempurnaan karya ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbang dalam perkembangan keilmuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 13 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	15
1. Pengertian Administrasi Publik.....	15
2. Paradigm Administrasi Publik.....	17
3. Fungsi Administrasi Publik.....	19
B. Perencanaan	20
1. Pengertian Perencanaan.....	20
2. Jenis Perencanaan.....	21
3. Proses Perencanaan.....	22
C. Pembangunan.....	23
1. Paradigma Pembangunan.....	23
2. Pengertian Pembangunan.....	25





3.	Tujuan Pembangunan	26
4.	Pembangunan Berdimensi Kerakyatan (People Centered Development).....	27
D.	Pembangunan Daerah	28
1.	Pengertian Pembangunan Daerah	28
2.	Strategi Pembangunan Daerah.....	28
E.	Visi dan Misi	32
1.	Pengertian Visi dan Misi	32
2.	Perumusan Penjelasan Visi.....	34
3.	Perumusan Penjelasan Misi.....	35
F.	Kesejahteraan Masyarakat.....	37
1.	Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	41
B.	Fokus Penelitian	41
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	43
D.	Jenis dan Sumber Data	43
E.	Teknik Pengumpulan Data	44
F.	Instrumen Penelitian	46
G.	Analisis Data.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
1.	Gambaran umum Kota Blitar	50
2.	Gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.....	54
3.	Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	58
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian	62
1.	Proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat	62
a.	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD.....	65
b.	Pengumpulan Data dan Informasi	67
c.	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.....	72
d.	Pelaksanaan Musrenbang RPJMD.....	74
e.	Perumusan Rancangan Akhir	76
f.	Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD ...	82
2.	Aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat	83
a.	Kepala Daerah Kota Blitar	83
b.	Sekretaris Daerah Kota Blitar.....	85
c.	Kepala Bappeda Kota Blitar	86
d.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota	

Blitar	86
e. Sekretaris Bappeda Kota Blitar	87
f. Kepala Dinas SKPD yang terkait di Kota Blitar	87
g. Anggota staff setiap bidang terkait pada Bappeda Kota Blitar	88
h. Anggota DPRD Kota Blitar	88
i. Masyarakat	89
C. Analisis Data	89
1. Proses dan tahapan dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat	89
a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD	89
b. Pengumpulan Data dan Informasi	90
c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	92
d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	93
e. Perumusan Rancangan Akhir	94
f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD	95
2. Aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat	96
a. Kepala Daerah Kota Blitar	97
b. Sekretaris Daerah Kota Blitar	98
c. Kepala Bappeda Kota Blitar	98
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar	99
e. Sekretaris Bappeda Kota Blitar	100
f. Kepala Dinas SKPD yang terkait di Kota Blitar	100
g. Anggota staff setiap bidang terkait pada Bappeda Kota Blitar	101
h. Anggota DPRD Kota Blitar	101
i. Masyarakat	102

BAB V	PENUTUP	
A. Kesimpulan		105
B. Saran		106
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN		111



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2011-2015	7
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar Tahun 2011-2015 (Rp 000.000)	8
3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar tahun 2011-2015 (%)	9
4	Jenis Perencanaan	22
5	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	47
6	Peta Kota Blitar	51
7	Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011- 2015 (jiwa)	53
8	Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Blitar	57
9	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	61
10	Langkah-langkah Penyusunan RPJMD	64
11	Pertumbuhan Ekonmi Kota Blitar Tahun 2011-2015	69
12	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2011-2015	71
13	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota	73
14	Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Blitar	74
15	Peserta Musrenbang RPJMD Kota Blitar	75
16	Sosialisasi APBD Pro Rakyat Jilid II	85



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	PDRB Perkapita Kota Blitar	68
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Blitar Tahun 2011-2015	72



BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan agenda penting dan tidak pernah terlewatkan karena masalah tersebut masih menjadi masalah utama pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Pembangunan tidak hanya dalam aspek ekonominya saja, namun mencakup seluruh aspek seperti politik, pertahanan, teknologi, budaya, kesehatan, maupun pendidikan. Pembangunan regional pun memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan nasional. Tolak ukur dari keberhasilan pembangunan nasional juga bergantung pada keberhasilan pembangunan regionalnya. Menurut Sumaatmaja (1988:49) pembangunan regional merupakan strategi pemerintah nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi perkembangan kearah yang dikehendaki.

Kartasmita (1997:9) menambahkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan tidak dapat berjalan jika tidak melalui suatu proses yang disebut dengan perencanaan pembangunan. Meskipun banyak yang terlibat dalam proses pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. Sedangkan perencanaan itu sendiri

menurut Listyaningsih (2014) merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi rencana dan pelaksanaannya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan.

Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan pedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Sebagaimana diketahui bersama bahwa, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015. Sebanyak 269 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten melaksanakan Pilkada Serentak,

termasuk Kota Blitar.

Pada tahun 2015 di Kota Blitar menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut telah ditetapkan Kepala

Daerah terpilih dan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016 –

2021, yaitu Bapak Muhammad Samanhudi Anwar, S.H. M.M. beserta Bapak Drs.

Santoso, M.Pd. Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah Kepala Daerah

dilantik, diwajibkan menyusun RPJMD.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif

tentang visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran,

strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi

masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan

penulisan tugas akhir ini adalah mencoba untuk menguak analisis dari proses

penyusunan RPJMD Kota Blitar yang merupakan salah satu kota di Jawa Timur

agar sesuai dengan visi misi agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran,

strategi, dan kebijakan pembangunan di Jawa Timur sehingga tidak bertentangan

dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil

proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung

oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan

RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikan dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Demi mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Kedudukan RPJMD sangat penting untuk dapat menerjemahkan berbagai kemungkinan perbedaan visi dan misi calon kepala daerah lainnya dengan kepala daerah yang terpilih sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan potensi sumberdaya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi Pemerintah Kota Blitar ditetapkan sebagai berikut : **“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera**

Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”. Visi ini juga merupakan lanjutan dari periode sebelumnya. Pada lanjutannya, APBD Pro Rakyat jilid kedua dengan tema **“One For All, All For One”**. Pada jilid kedua ini pemerintah Kota Blitar mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Kota Blitar, dengan begitu diharapkan masyarakat juga terlibat dalam pembangunan Kota Blitar menjadi semakin baik.

Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Kebijakan tersebut dapat dicapai melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat. Dalam istilah umum, kesejahteraan pada garis besarnya berarti diakui dan dihormatinya hak-hak warga

negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. (Dipoyudo, 1984:vii)

Negara yang sejahtera juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa Pemerintah juga bertugas “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil

analisis terhadap kondisi yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. Dalam aspek tersebut juga

terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi seperti Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan

Ekonomi, Indeks Gini, dsb. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human

Development Indeks (HDI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur

kualitas Sumber Daya Manusia. IPM merupakan perhitungan kumulatif dari

indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran perkapita penduduk

di wilayah tersebut. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu

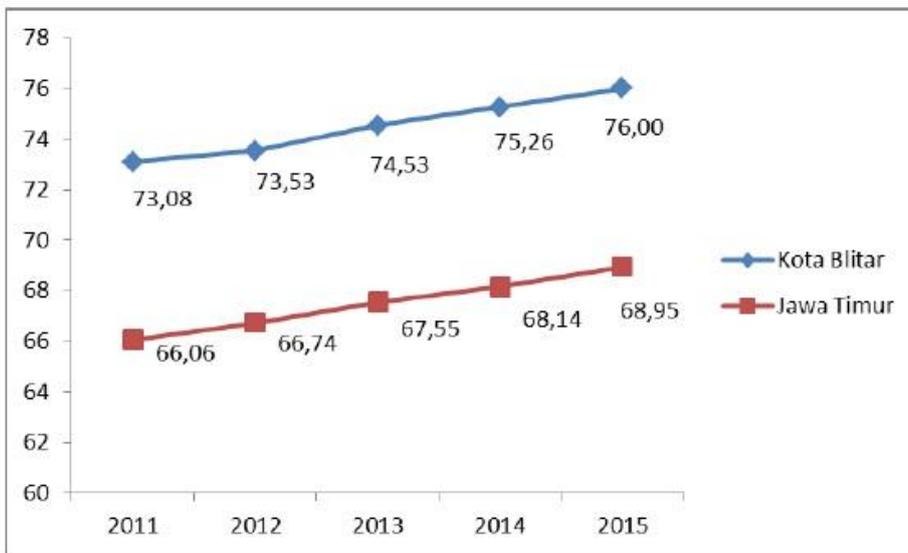
wilayah termasuk wilayah yang maju, atau berkembang dan juga untuk mengukur

pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pencapaian IPM Kota Blitar

ini jauh di atas rata-rata nilai IPM Jawa Timur, bahkan jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota lain se Jawa Timur, IPM Kota Blitar menempati urutan tertinggi

ke-5 (lima).



Gambar 1. Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2011-2015

Sumber : *BPS Kota Blitar 2016*

PDRB merupakan cerminan potensi perekonomian suatu wilayah.

Indikator ini dikelompokkan ke dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian,

pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih,

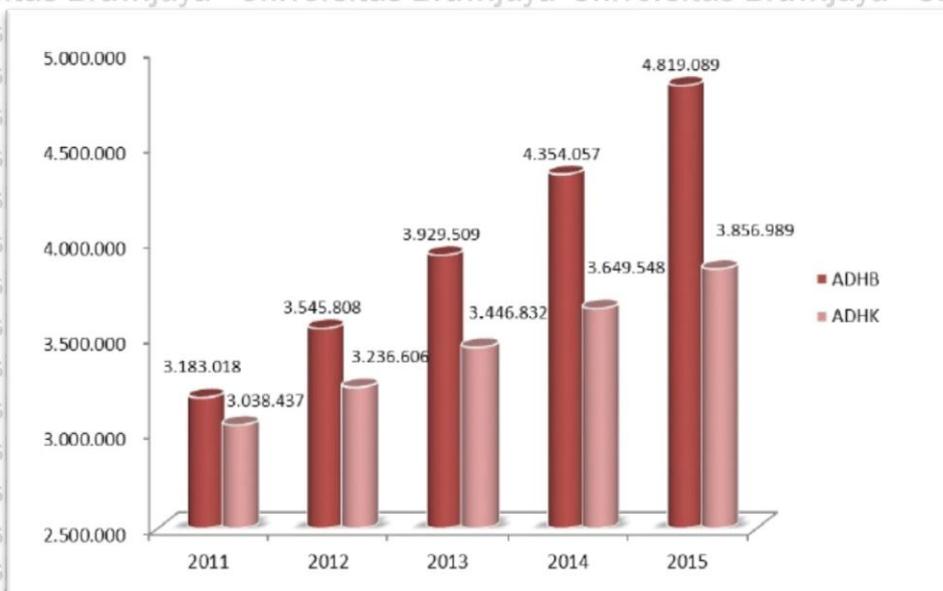
bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Perhitungan PDRB

dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun tertentu. Tahun

yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah Tahun 2000.



Gambar 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar Tahun 2011-2015 (Rp 000.000)

Sumber : Kota Blitar dalam Angka 2016

Dilihat dari grafik PDRB di atas, Kota Blitar mempunyai nilai PDRB yang tinggi berturut turut dari sektor tersier, sekunder dan terakhir sektor primer.

Sektor primer tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi Kota Blitar.

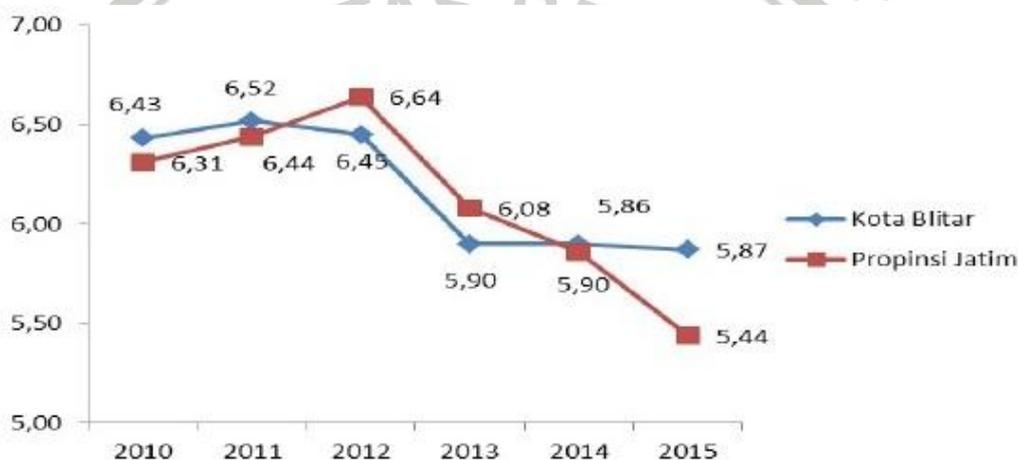
Keterbatasan Kota Blitar dalam sumber daya alam ditunjukkan dengan kontribusi PDRB dari sektor primer yang sangat kecil. Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat dilakukan dan perlu untuk terus dikembangkan adalah

dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis usaha di tiga bidang tersebut maupun jenis-jenis usaha yang pada dasarnya menjadi penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut di atas.

Dilihat dari data IPM dan PRDB sudah cukup baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya, tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Nilai pertumbuhan

ekonomi Kota Blitar relatif tinggi hingga melampaui nilai pertumbuhan ekonomi kawasan regional Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi di daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama angka inflasi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar dari Tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar tahun 2011-2015 (%)

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016*

Tetapi jika dilihat dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar menurun jika dibanding tahun sebelumnya seperti laju perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 pada angka 6,45% mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu menjadi 5,90% dan turun lagi pada tahun 2015 menjadi 5,87. Hal ini tentu menjadi masalah bagi pemerintah Kota Blitar untuk menjadikan bahan evaluasi pertumbuhan ekonomi di tahun selanjutnya. Karena indikator pertumbuhan ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Selain IPM, PDRB dan pertumbuhan ekonomi, yang menjadi fokus Pemerintah Kota Blitar dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 adalah Kesejahteraan social yang meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Tingkat Kemiskinan. Dengan data yang telah dijelaskan, sebagaimana disebutkan dalam Pemandagri nomor 54 Tahun 2010 lampiran III bahwa sasaran pokok diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD terkait tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan bagaimana proses penyusunan RPJMD.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Blitar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan tahapan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat?

2. Bagaimana peran aktor yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa perumusan masalah. Berikut adalah tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses dan tahapan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis peran aktor yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kontribusi Akademis
 - a. Memberikan penjelasan tentang bagaimana proses dan tahapan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

- b. Sebagai bahan informasi tambahan dan pembandingan bagi pihak-pihak lain dalam melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun

2016-2021, khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

- b. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya pengembangan konsep perencanaan pembangunan khususnya dalam analisis bagaimana proses penyusunan RPJMD.

- c. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik yang hendak melakukan penelitian tentang analisis proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri peneliti menguraikan apa yang akan diteliti, alasan penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan yang ingin diteliti.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang ada kaitannya dengan materi penulisan, dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Teori yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah Administrasi Publik, Perencanaan, Pembangunan Daerah, Visi dan Misi, Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis menguraikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk mengumpulkan data yang diperlukan serta instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat penyajian data dan analisis data. Dalam penyajian data dikemukakan gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar sebagai situs tempat penelitian, proses penyusunan RPJMD Kota Blitar dalam aspek kesejahteraan masyarakat, serta aktor-aktor yang terlibat dalam

proses penusunan RPJMD Kota Blitar. Kemudian dalam analisis data penyajian data akan dianalisis secara lebih mendalam.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan disertai dengan saran yang diberikan atas permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Menurut Siagian (2008), administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Syafri (2012:14) istilah publik diartikan sebagai “umum, orang banyak, masyarakat, dan Negara”.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinaikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan public (Chandler dan Plano dalam Pasolong, 2012:55). Disisi lain Nigro dalam Pasolong (2012:56) memandang administrasi public dari berbagai macam sisi, seperti

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif
3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik
4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat

5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Dari pengertian istilah diatas dapat diartikan bahwa administrasi publik

merupakan semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan

melaksanakan kebijakan Negara (White dalam Listyaningsih, 2014:2). Sedangkan

menurut Waldo dalam Listyaningsih (2014:2) administrasi publik mengandung

dua pengertian yaitu:

- a. Administrasi publik yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
- b. Administrasi publik yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara.

Menurut Shafritz dan Russel dalam Listyaningsih (2014:3)

Administrasi Publik dibedakan menjadi beberapa definisi berdasarkan empat

kategori yaitu :

- a. Politik, Administrasi Publik sebagai apa yang dikerjakan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, implementasi kepentingan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu.
- b. Legal/hukum, Administrasi publik sebagai penerapan hukum, sebagai regulasi, sebagai pemberian sesuatu dari penguasa kepada rakyatnya.
- c. Manajerial, Adminintrasi publik adalah fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen.
- d. Mata Pencapaian, Administrasi Publik sebagai suatu bentuk profesi muali dari tukang sapu sampai ahli sesuatu di sector publik dimana semua tidak sadar bahwa mereka adalah administrasi publik.

Syafri (2012:18) berpendapat bahwa pada awalnya lokus studi

administrasi public adalah lembaga-lembaga pemerintah yaitu aparatur Negara

atau birokrasi saja dengan fokus yaitu menjalankan kebijakan-kebijakan Negara

atau pemerintah. Tetapi saat ini lokus dan fokus studi administrasi publik telah bergeser yaitu tidak lagi semata-mata hanya pada lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup beberapa institusi lain yang terkait dengan upaya untuk memenuhi kepentingan bersama/publik seperti organisasi nonpemerintah, militer, kelompok kepentingan, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil lainnya. Demikian juga fokusnya tidak lagi sekedar implementasi/pelaksanaan kebijakan pemerintah, tetapi juga mencakup pembuatan formulasi kebijakan Negara, pelaksanaan kebijakan, dan penataan hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

Dapat disimpulkan dari teori-teori diatas bahwa Administrasi merupakan segala suatu proses kerjasama dalam suatu lingkup publik yang mencakup tiga peranan penting yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif yang mana mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi suatu proses politik. Dalam penelitian ini contohnya adalah bagaimana proses dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana telah merubah lokus dan fokus studi administrasi publik. Yaitu peran dari berbagai pihak yang sangat penting dan saling berhubungan sehingga RPJMD tersebut nantinya selaras dengan aspirasi masyarakat maupun kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari situlah mengapa administrasi publik merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian ini.

2. Paradigma Administrasi Publik

Henry dalam Pasolong (2012:35), memaparkan Lima paradigma administrasi publik yang dipetakan dalam upaya untuk menunjukkan bahwa

gagasan administrasi publik sebagai sesuatu yang unik, sintesis lapangan yang relatif baru. Disiplin ilmu ini disusun sebagai suatu pencampuran dari teori organisasi, ilmu manajemen, dan konsep kepentingan umum. Kemudian menyarankan bahwa sudah waktunya administrasi publik membentuk dirinya sebagai kurikulum otonom di perguruan tinggi dan universitas dalam rangka mempertahankan relevansi dan kelayakan sosialnya. Lima paradigme tersebut antara lain :

1. Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi, tahun 1990-1926
2. Paradigma 2 : Prinsip- Prinsip Administrasi, tahun 1927-1937
3. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik, tahun 1950-1970.
4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, tahun 1956-1970
5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, tahun 1970-Sekarang

Paradigm Administrasi Publik tersebut telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan peran Administrasi Publik khususnya terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi, pengelolaan organisasi secara internal, serta antara Administrasi Publik dengan politisi, masyarakat, dan actor lainnya. Implikasi yang demikian tentu saja pada akhirnya akan sangat menentukan corak dan ragam dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sebuah Negara.

Sedangkan menurut Syafri (2014:8), Administrasi Publik memiliki beberapa paradigma, dimana setiap paradigme selalu mengandung unsure perubahan yang tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Setelah perang dunia kedua, para pakar Amerika Serikat yang tergabung dalam *American Society for Public Administration* (ASPA), mempelopori lahirnya Administrasi yang berorientasi pada perubahan atau disebut dengan

pembangunan.

3. Fungsi Administrasi Publik

Sementara itu administrasi publik menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:9) meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Kemampuan administrasi publik untuk mendukung proses perubahan atau pembangunan. Kriteria efektivitas tidak saja dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan seperti pemeliharaan ketertiban., kepastian pelaksanaan kegiatan dalam masyarakat dan bernegara, melainkan juga dalam tugas-tugas pembangunan yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan , pengendalian serta pengawasan pembangunan. Di dalam Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan, administrasi publik dituntut dapat mendukung proses perubahan ke arah kemajuan social, ekonomi, pemangunan bangsa dan modernisasi.
- b. Administrasi publik perlu memperhatikan bahwa proses pembangunan yang didukungnya itu merupakan kegiatan yang memerlukan ketertiban dan keputusan untuk lebih menjamin tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. Mengingat pola kehidupan masyarakat di Negara berkembang masih sangat labil, sehingga pemerintah harus dapat melakukan kegiatan yang mengarah pada ketertiban dan keterpaduan.
- c. Administrasi publik untuk Negara-negara yang baru membangun juga dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menciptakan iklim, mengupayakan, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan usaha/kegiatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikehendaki masyarakat. Secara populer disebut dengan pendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- d. Administrasi publik harus mampu menjadi *agent of change* bagi masyarakat di Negara berkembang.

Dapat disimpulkan pada penjelasan diatas bahwa administrasi publik sangat berkaitan erat dengan proses perencanaan maupun pembangunan. Dimana fungsi dari administrasi adalah untuk mendukung proses perubahan atau pembangunan. Penelitian ini meneliti pada fungsi pertama yaitu tugas-tugas pembangunan khususnya yaitu perencanaan. Melihat bagaimana suatu proses administrasi dalam perencanaan suatu pembangunan di daerah Kota Blitar.

B. Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Conyers dan Hill dalam Kuncoro (2012:50) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan dan pilihan, tentang cara-cara, alternative menggunakan sumberdaya yang tersedia, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada beberapa waktu di masa depan. Selain itu, menurut Kuncoro (2012:49) Perencanaan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait. Empat fungsi manajemen tersebut adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan.

Merencanakan (*to plan*) membutuhkan pemahaman dimana posisi daerah dan kemana mau melangkah ke depan, bagaimana formulasi visi dan misi, serta strategi apa yang dipilih untuk mencapai target. Mengorganisasikan (*to organize*) adalah bagaimana pemimpin daerah mengelola semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Mengarahkan (*to direct*) adalah bagaimana pemimpin mengarahkan sumber daya agar mencapai visi, misi, dan target yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan memberi motivasi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Mengendalikan (*to control*) merupakan fungsi terakhir yang intinya mengevaluasi dan melaporkan kinerja organisasi dan daerahnya.

Secara mendasar, proses perencanaan mencakup tiga tahapan, yaitu:

formulasi nilai, identifikasi cara-cara untuk mencapai tujuan, dan pelaksanaan (Faludi dalam Saraswati, 2010:7). Perencanaan adalah aplikasi dari metoda ilmiah bagaimanapun sederhananya untuk membuat kebijaksanaan (Faludi dalam Saraswati, 2010:7) yaitu:

“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Di dalam perencanaan, “proses “merupakan sesuatu yang bersinambungan (*planning is a continuous proses*).”

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang (Conyes dan Hills, 1984). Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat elemen dasar perencanaan yaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan untuk masa depan.

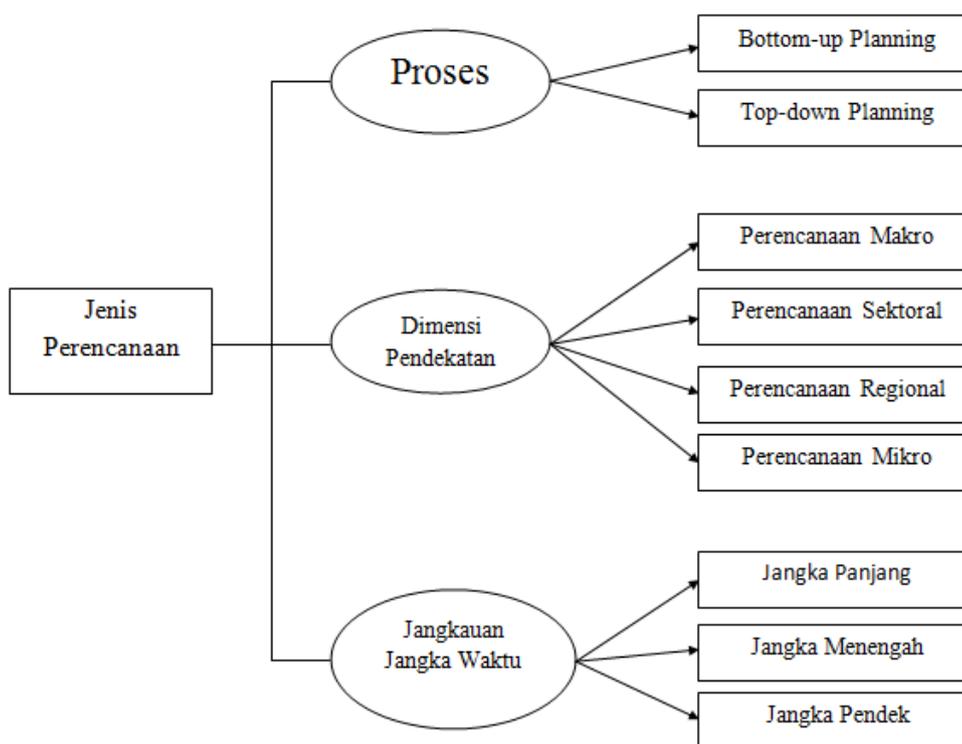
Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa RPJMD sangat diperlukan suatu daerah untuk mencapai tujuan dalam jangka menengah atau selama 5 tahun masa jabatan maupun untuk jangka panjang selama 20 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan untuk pembangunan daerah di masa mendatang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, ada definisi lain yang menyebutkan bahwa perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai. Perencanaan untuk masa depan dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap yang diperlukan untuk masa depan. Contohnya seperti perumusan visi dan misi oleh setiap kepala daerah pada awal periode kerja untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu pembangunan daerah tersebut.

2. Jenis Perencanaan

Menurut Kuncoro (2012:25) perencanaan dapat dibagi kedalam tiga

jenis perencanaan, yaitu berdasarkan proses, dimensi pendekatan, dan jangkauan jangka waktu. Ketiga jenis perencanaan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan tindakan masa depan yang tepat.



Gambar 4. Jenis Perencanaan

Sumber : Kuncoro (2012:26)

3. Proses Perencanaan

Kuncoro (2012:52) juga menambahkan bahwa SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara serta masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. SPPN disusun untuk

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, dikenal empat pendekatan dalam proses perencanaan, yaitu proses politik, teknokratik, partisipatif, serta *bottom-up* dan *top-down*. Keempat proses perencanaan tersebut memiliki pendekatan dan ciri tersendiri.

1. Proses Politik
Pemilihan presiden/kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh setiap calon presiden/kepala daerah.
2. Proses Teknokratik
Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Proses Partisipatif
Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan (*stakeholders*) yang antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang.
4. Proses *bottom-up* dan *top-down*
Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan (menurut jenjang pemerintahan).

C. Pembangunan

1. Paradigma Pembangunan

Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap

(afektif) dan bertingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, paradigma pembangunan dapat didefinisikan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan baik pembangunan dalam arti sebagai proses maupun sebagai metode yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat.

Menurut (Kartasasmita, 1997) paradigma pembangunan terdiri atas beberapa hal, antara lain :

1. Paradigma pembangunan a la modernisasi yang sempat membawa Indonesia mencapai keberhasilan ekonomi dapat tetap dilanjutkan dengan menjadikan indikator seperti pendapatan nasional, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi sebagai tools atau alat dalam mengukur keberhasilan pembangunan.
2. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan mutlak untuk dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan mendorong pada pembentukan modal sosial serta tata pengelolaan yang baik (good governance).
4. Paradigma pembangunan yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah dengan multiparadigma. Indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang terdapat pada paradigma modernisasi dapat dijadikan sebuah tools. Paradigma pemberdayaan sangat diperlukan dalam upaya pembentukan modal sosial untuk tercapainya tata kelola yang baik. Selain kedua paradigma tersebut, yang menjadi penting dalam proses pembangunan adalah menyiapkan kualitas entitas pembangunan dalam beradaptasi dengan lingkungannya.

konsepsi ini dinamakan dengan Konsep Kemandirian Lokal.

2. Pengertian Pembangunan

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006:10). Sedangkan Mohd dan Yusoff (2003:20) berpendapat “bahwa konsep pembangunan begitu luas cangkupannya, terdapat beberapa pengertian yang biasanya disinonimkan dengan konsep pembangunan, yaitu konsep pertumbuhan ekonomi, modernisasi, *industrialisasi*, normatif atau hak keperluan asas, dan *environmentalisme*.”

Selanjutnya, Todaro dalam Rustiadi, dkk (2011:120) berpendapat “bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.”

Pembangunan, apa pun penjelasan ideologisnya, merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sengaja (*intervention*) dan terencana dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dari kondisi kehidupan sebelumnya. Kondisi kehidupan yang lebih baik seperti apa yang diinginkan dalam proses perubahan itu, kata yang tidak pernah absen dari telinga setiap warga negara adalah kehidupan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, perdebatan tentangnya berkembang menjadi perdebatan ideologis tentang bagaimana cara pencapaian perubahan dan hasil dari proses perubahan itu sendiri, yang berhubungan dengan

kualitas kehidupan manusia. Kalau perubahan yang diharapkan lebih baik itu adalah sejahtera sebagai sebuah kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat, pertanyaan tentangnya adalah berdasarkan basis apa hidup sejahtera itu diletakkan, apakah sejahtera itu ditunjukkan oleh basis individu atau basis komunitas, atau bahkan keduanya (Goodin dan Fitzpatrick dalam Susetiawan, 2009).

3. Tujuan Pembangunan

Todaro, Smith, ed. (2003:16) mengusulkan 3 tujuan dari pembangunan yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk meningkatkan ketersediaan dan melebarkan distribusi dari kebutuhan dasar bertahan hidup seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, untuk meningkatkan level kehidupan termasuk pendapatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, yang bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan tapi juga menimbulkan kepercayaan diri secara individu dan nasional. Ketiga, untuk memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi individu-individu dan bangsa-bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan dari orang lain dan negara lain, serta membebaskan dari pengabaian dan kesengsaraan. Sehingga rencana pembangunan kota dan kabupaten harus memerhatikan tujuan-tujuan tersebut. Sebaliknya, selama ini pembangunan di Indonesia hanya berpusat pada masalah fisik tanpa memperhatikan hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi suatu pembangunan tersebut. Karena itu dibutuhkan perubahan paradigma semua pihak yang berkepentingan di kota dan

kabupaten tentang pembangunan berkelanjutan.

4. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan (*People Centered Development*)

Menurut Korten (1984) dalam Tjokrowinoto (1996 : 218), logika yang melandasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*), sumber pembangunan yang utama adalah informasi prakarsa yang kreatif yang tidak pernah habis, dan tujuannya adalah perkembangan manusia dalam arti aktualisasi yang optimal dari potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu, bukan hanya sebagai subyek, tetapi sebagai pelaku (*aktor*) yang menentukan tujuan, menguasai sumber daya dan mengarahkan proses yang menentukan hidupnya. Oleh karenanya paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant community*).

Bryant & White (1987 : 22-23) memandang pembangunan yang berwawasan "*people centered*" sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya dan ini berarti masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dan atau masyarakat perlu berperan serta. Selain itu ditegaskan pula bahwa pembangunan bukanlah semata-mata untuk meningkatkan manfaat material yang pada tataran praksis seringkali membuahkan dehumanizes.

Dan untuk itu maka paradigma *people centered development* ini dalam membangun martabat manusia membutuhkan aspek-aspek antara lain : (1) *capacity*, (2) *equity*, (3) *empowerment*, (4) *sustainability*, (5) *interdependence*.

Dalam pandangan Budiman (1995), paradigma *people centered development* ini diartikan sebagai upaya pembangunan yang ditujukan kepada

manusia melalui penciptaan kondisi atau lingkungan, baik lingkungan politik maupun budaya yang dapat mendorong lahirnya manusia yang kreatif. Karena hanya manusia yang kreatif yang mampu menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dimilikinya.

D. Pembangunan Daerah

1. Pengertian Pembangunan Daerah

Menurut Bryant dan White (1987:21) pembangunan mencakup pengertian “menjadi dan “mengerjakan”. Siagian (1983:111) mengutarakan bahwa “pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*National Building*).”

Sedangkan menurut Suryono (2004:37), berpendapat setidaknya terdapat lima persyaratan pem-bangunan, antara lain: Kemampuan, Kebersamaan, Kekuasaan, Ketahanan, serta Saling ketergantungan.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa pembangunan merupakan pengerjaan dari sesuatu. Pekerjaan tersebut tertuju pada perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan suatu proyek atau program untuk mewujudkan perubahan yang bermakna di dalam masyarakat.

2. Strategi Pembangunan Daerah

Menurut Nurcholis, dkk (2009:47) ”Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam

mewujudkan visi dan misi”. Sedangkan dalam Renstra Kota Blitar tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa :

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategi focused management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Pelaksanaan pembangunan tidak mungkin bisa dilakukan secara sentralistis penuh, ataupun dilakukan pada tingkat daerah secara penuh. Untuk itu, yang dilakukan adalah sebuah optimalisasi. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui sistem perencanaan di berbagai tingkatan. Masing-masing tingkat pemerintahan mempunyai peranan, fungsi, dan tugas tertentu.

Contohnya, dalam pemberian bantuan dana suatu program, perlu disertai kebijakan yang lebih transparan. Sehingga, dari bantuan pembangunan daerah melalui suatu program tertentu, dapat lebih diintegrasikan dengan kebijakan investasi dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk itu, perlu disusun sebuah matriks program sektoral pada tingkat nasional dan program pembangunan daerah. Yang di maksud matriks dalam hal ini adalah sebuah alat perencanaan dan analisis bagi pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah di masa mendatang.

Apapun bentuk bantuan pada pembangunan daerah, harus di lihat sebagai injeksi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang paling membutuhkan.

Untuk itu, Sumodiningrat (1998:61) menjelaskan prinsip penting dalam menjamin efektifitasnya, antara lain yaitu:

- a. Prinsip targeting (*targetting mechanism*): Alokasi dana, dan prasarana harus terarah pada kelompok sasaran masyarakat, kegiatan ekonomi dan wilayah yang paling memerlukan. Dalam hal ini, daftar usulan proyek dari daerah yang mencerminkan sasaran perencanaan jangka menengah, akan sangat membantu sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan alokasi.
- b. Prinsip penyaluran (*delivering mechanism*): dana, sarana dan prasarana disalurkan pada kelompok sasaran secara utuh, lancar dan tepat waktu.
- c. Prinsip penggunaan (*receiving mechanism*): masyarakat kelompok sasaran harus siap menerima dan menggunakan bantuan tersebut.
- d. Prinsip pengguliran (*revolving mechanism*): Dana, sarana, dan prasarana yang ditunjukkan pada kelompok sasaran penduduk miskin harus dapat menjadi modal dasar, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi mereka secara berkelanjutan
- e. Prinsip pemantauan dan evaluasi (*monitoring mechanism*) : Dana, sarana dan prasarana yang ditujukan kepada kelompok sasaran, harus dapat dipantau dan dievaluasi. Pencatatan, walaupun sederhana, dapat digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan. Pencatatan juga berguna untuk menilai tingkat keberhasilan.

Suatu rumusan strategi menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah.

Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang dapat menunjukkan bagaimana strategi yang di buat dapat menciptakan nilai (*strategi objective*).

Dengan parameter tersebut, dapat diketahui indikasi keberhasilan suatu strategi dalam menjalankan kebijakan ataupun suatu program sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir yang strategis. Hal ini ditujukan untuk transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan daerah juga merupakan

upaya memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kualitas kehidupan lebih baik, adil, sejahtera, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut membutuhkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang – undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok.

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009. Dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan “sharing” pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. (RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2005).

E. Visi dan Misi

1. Pengertian Visi dan Misi

Menurut Siagian (2008) visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler (2007). Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pemendagri No.54 Tahun 2010 lampiran III bahwa sasaran pokok diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan

dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Kriteria suatu penjelasan visi dan misi, sebagai berikut:

1. Dapat menyelaraskan muatan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD periode berkenaan.
2. Menerjemahkan pernyataan visi dan misi ke dalam butir-butir penjelasan yang mudah dipahami dan tidak bias.
3. Menjelaskan visi dan misi dalam kriteria yang memudahkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Untuk dapat menyusun penjelasan visi dan misi dimaksud, penting bagi tim untuk memahami bagaimana seharusnya visi dan misi yang baik dibuat.

Dengan demikian, penjelasan visi dan misi juga dimaksudkan untuk menyempurnakan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sepanjang secara substantif tidak keluar dari makna yang sesungguhnya.

2. Perumusan Penjelasan Visi

Pada Permendagri No.54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing.

Dari penjelasan di atas, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dapat menerjemahkan berbagai kemungkinan perbedaan visi dan misi calon kepala daerah lainnya dengan kepala daerah yang terpilih sehingga menjadi landasan penyusunan dokumen RPJMD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kriteria suatu rumusan visi antara lain sebagai berikut:

- a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction);
- b. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;

- c. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (articulative);
- d. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
- e. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Syarat visi yang baik:

- a. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable);
- b. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirable);
- c. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (feasible);
- d. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (focussed);
- e. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible);
- f. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku (communicable); dan
- g. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Visi kepala daerah yang telah diuraikan menjadi pokok-pokok visi harus dijelaskan untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi.

3. Perumusan Penjelasan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan

yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

- a. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
- b. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
- c. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

F. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Pertimbangan Pelaksanaan Undang-Undang No. 32 tahun 2014 bahwa :

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan diatas mengatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemerintah daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Menurut Mosher (1987), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan

rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Friedlander (1968:10) juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial merupakan :

“Social Welfare is the organized system of social service and institution, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standarts of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community”

Teori diatas juga dapat diartikan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir daripada pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga, yang dimaksud untuk membantu individu dan kelompok agar tercapai standar-standar kehidupan yang kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka berkembang segenap kemampuan dan meningkat kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat)

Pendapat lain oleh Suharto (2004:2), Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan social dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan social dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara lebih rinci disebutkan oleh Dipoyudo berupa tersedianya ;

1. Cukup sandang dan pangan dan perumahan yang layak, sehingga ia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang;
2. Fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat;
3. Kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan;
4. Jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut menghadapi masa tuanya pada saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah;
5. Sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam menghadapi segala urusannya;
6. Sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat dan mudah;
7. Kesempatan kereja yang sesuai keinginan dan kecakapannya;
8. Kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan intelektualnya;

Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bisa di ukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah.

Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi

miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat structural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko social ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan teori yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini menggambarkan dan melukiskan secara sistematis fakta dan karakteristik yang didapat dari hasil penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif antara lain adalah untuk menjelaskan secara detail dan keseluruhan terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian dan kondisi yang terjadi di lapangan antara peneliti dan informan. Selain itu metode ini dapat menyesuaikan apabila terjadi perubahan-perubahan di lapangan selama penelitian berlangsung yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara terperinci mengenai proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti. Fokus penelitian bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan tetap pada jalannya dan dapat menemukan jawaban yang tepat dalam penelitian tersebut.

Penentuan fokus penelitian ini dimaksudkan agar peneliti tetap dalam pembahasan serta tidak melebar ke permasalahan lainnya. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai tahapan dan peran aktor yang terlibat sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), antara lain:

1. Proses dan tahapan dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat, dilihat dari :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
 - b. Pengumpulan Data dan Informasi
 - c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
 - d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
 - e. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
 - f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

2. Peran aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat, antara lain :

- a. Kepala Daerah Kota Blitar
- b. Sekretaris Daerah Kota Blitar
- c. Kepala Bappeda Kota Blitar
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar
- e. Sekretaris Bappeda Kota Blitar

- f. Kepala Dinas SKPD yang terkait di Kota Blitar
- g. Anggota staff setiap bidang terkait pada Bappeda Kota Blitar
- h. Anggota DPRD Kota Blitar
- i. Masyarakat

3. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi yang dijadikan subyek penelitian ini adalah Kota Blitar. Alasan memilih Kota Blitar dikarenakan pada tahun 2015 Kota Blitar merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang mengikuti Pilkada, dan pada tahun ini telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi fokus penelitian ini. Sedangkan situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap suatu keadaan yang sebenarnya dalam objek yang di teliti. Dalam penelitian ini situs penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Blitar yang merupakan instansi terkait dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat bagi penulis untuk mencari data dan informan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Arikunto, sumber data adalah objek data tersebut diperoleh. Berkaitan dengan penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data dan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara secara langsung terhadap informan yang berhubungan dengan judul penelitian. Dan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan kepala bidang maupun staff pada Bappeda yang terkait dalam proses penyusunan RPJMD.

2. Data Sekunder

Menurut Moeleong data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh oleh peneliti melalui studi pustaka, buku-buku literature, RPJMD, Jurnal, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi, partisipasi dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam latar penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Sugiyono menyebutkan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua

orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait permasalahan dalam penelitian.

Menurut Hendryadi, teknik pengumpulan data wawancara memiliki beberapa kelebihan seperti :

- Bisa membangun hubungan dan memotivasi responden
- Bisa mengklarifikasi pertanyaan, menjernihkan keraguan, menambah pertanyaan baru
- Bisa membaca isyarat non verbal
- Bisa memperoleh data yang banyak

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Yang dimaksud dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan terbuka, namun masih dalam batasan tema dan alur pembicaraan. Pada metode wawancara semi terstruktur, peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan inti saja sebagai kunci panduan untuk wawancara. Dalam proses wawancara, pertanyaan yang sudah disiapkan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tetapi masih dalam fokus penelitian yang sudah ditentukan.

2. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh, peneliti juga membutuhkan data tertulis yang telah ada dan digunakan sebagai data pendukung.

Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah Rancangan Akhir RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 dan data lain yang dapat menunjang penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu kerangka pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian, yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara. Pedoman ini bertujuan untuk mengarahkan dan membatasi pengumpulan data yang terlalu luas sehingga peneliti lebih fokus dan mendapat data yang akurat.

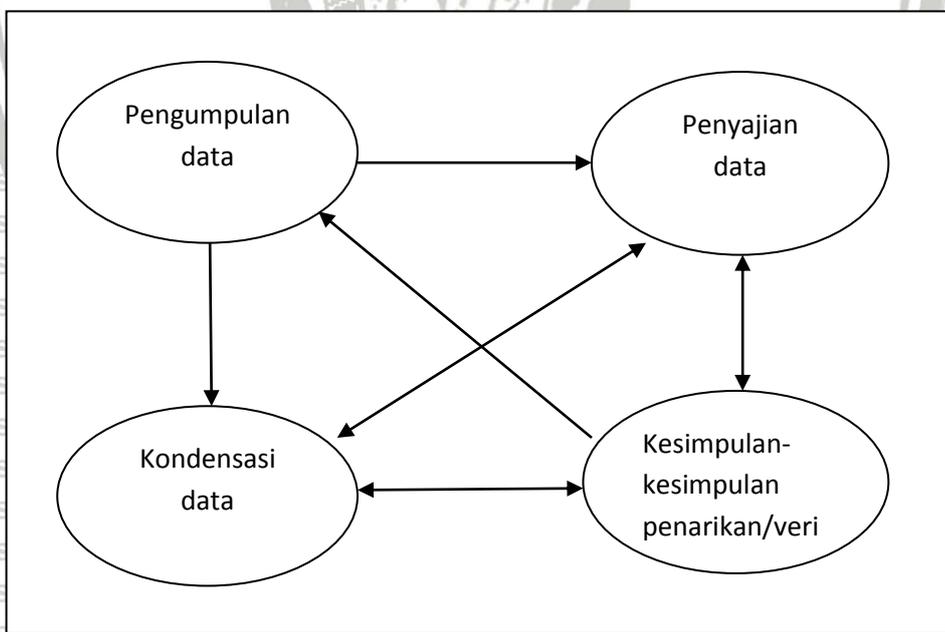
3. Catatan lapangan

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisa masalah dengan kata-kata tertulis dan menghasilkan data deskriptif. Sehingga penulis dapat menganalisis permasalahan dengan lebih fokus terhadap mengolah fakta-fakta. Teknik analisa data kualitatif ini ditujukan untuk mengorganisasikan data, menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data sampai dapat digunakan untuk menulis hasil penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2014: 91) analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.



Gambar 5. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2014: 91)



1. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transparasi data yang di dapat dari lokasi penelitian. Kondensasi data ini dapat dilakukan sebelum mendapatkan keseluruhan dari semua data yang dicari dan kondensasi ini dilakukan terus menerus selama penelitian dilakukan. Kondensasi dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*)

Langkah terakhir dalam model ini adalah penarikan kesimpulan yang merupakan penggambaran kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dari awal pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal tetapi juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara hingga peneliti dapat menemukan perkembangan di tempat penelitian. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan pencatatan

pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus yang berbeda, khas atau mungkin menyimpang dari kebiasaan masyarakat. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan temuan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan dan Situs Penelitian

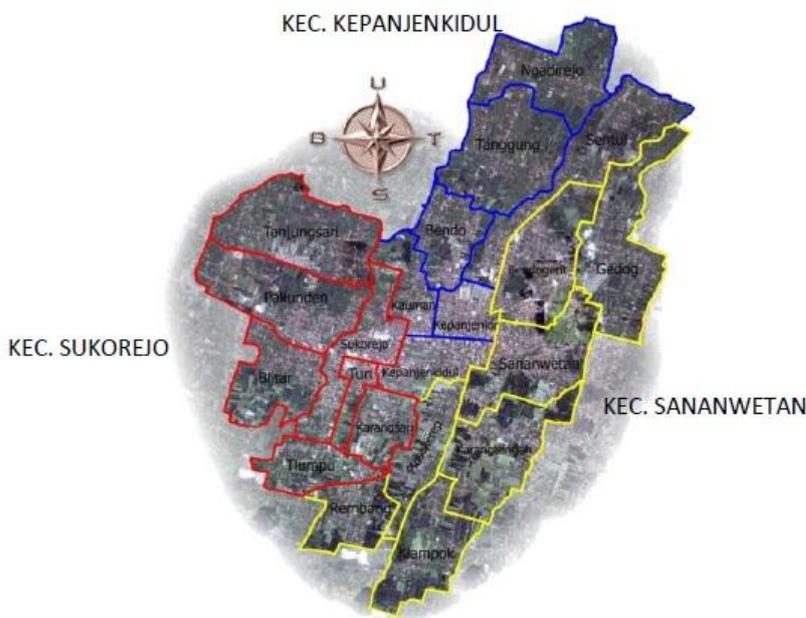
1. Gambaran Umum Kota Blitar

a. Karakteristik dan Luas Wilayah

Kota Blitar juga dikenal dengan sebutan Kota Patria dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah pemerintah kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar. Luas wilayahnya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Namun dalam konteks pengembangan kota, maka secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar. Adapun batas administrasi Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Batas wilayah Utara: Kec. Garum dan Kec. Nglegok, Kab. Blitar
- Batas wilayah Timur : Kec. Kanigoro dan Kec. Garum, Kab. Blitar
- Batas wilayah Selatan: Kec. Sanankulon dan Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
- Batas wilayah Barat : Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok, Kab. Blitar

Kota Blitar memiliki luas wilayah 32,58 km² dan terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km², Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sananwetan 12,15 km². Masing-masing kecamatan memiliki 7 (tujuh) kelurahan yang kemudian terbagi dalam 187 Rukun Warga (RW) dan 638 Rukun Tetangga (RT).



Gambar 6. Peta Kota Blitar

Sumber : *Rancangan RPJMD Kota Blitar*

b. Letak dan Kondisi Geografis

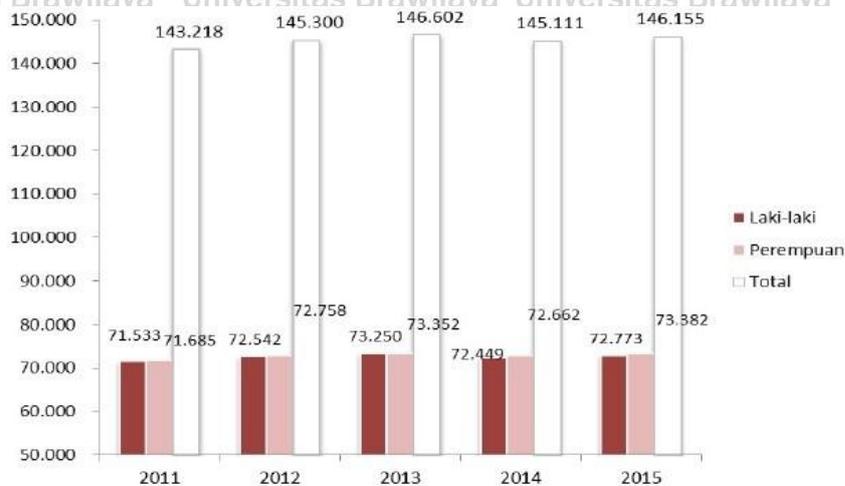
Kota Blitar secara geografis terletak di ujung selatan Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 meter dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112°28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan dan memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C-34°C karena lokasinya berada di kaki Gunung



Kelud. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupapemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi di luar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

c. Kondisi Demografi

Jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kota Blitar mengalami peningkatan dari 143.218 jiwa pada tahun 2011 menjadi 146.155 jiwa pada Tahun 2015. Berdasarkan data registrasi penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, dari jumlah penduduk tersebut memiliki rasio jenis kelamin 0,997 yang artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Kecamatan paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Sananwetan, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Kepanjenkidul.



Gambar 7. Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011- 2015 (jiwa)

Sumber : BPS Kota Blitar (2016)

d. Visi Kota Blitar

“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”

e. Misi Kota Blitar

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi.
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif.



5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.

6. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kepada daerah kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Untuk itu maka pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat.

a. Visi dan Misi Bappeda

- **Visi Bappeda**

“Mewujudkan Bappeda sebagai perencanaan yang professional tahun 2015”

- **Misi Bappeda**

1. Menyusun perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas internal daerah, antar pemerintah Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat dalam rangka mewujudkan produk perencanaan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan basis data perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
3. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan.

5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan

2) **Tugas dan Fungsi Bappeda**

• **Tugas Bappeda:**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

• **Fungsi Bappeda:**

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan
- d. Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan
- e. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas



pembantuan

h. Penyusunan, penetapan dan pengkoordinasian penerapan Rencana

Tata Ruang Wilayah Daerah

i. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang,

penelitian dan pengembangan

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang,

penelitian dan pengembangan

k. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang

administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan

tugas badan

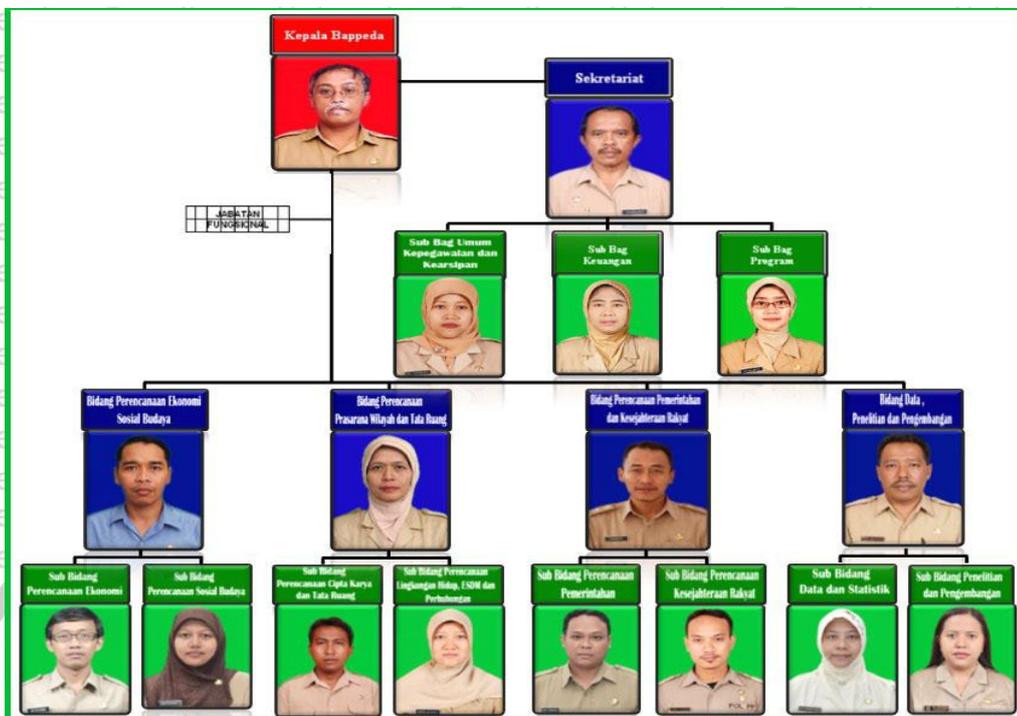
l. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di

lingkunganBadan

m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja

Badan

3) Struktur Organisasi



Gambar 8. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Blitar

Sumber : Dokumentasi Bappeda Blitar

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Blitar terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekertariat membawahi :
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
3. Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya membawahi :
 - Sub Bidang Perencanaan Ekonomi
 - Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya



4. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang membawahi :

- Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang
- Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan

5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

- Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan
- Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

6. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan membawahi:

- Sub Bidang Data dan Statistik
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan daerah juga merupakan upaya memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kualitas kehidupan lebih baik, adil, sejahtera, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut membutuhkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang – undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok.

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009. Dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan “sharing” pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. (RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2005).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021

Terpilihnya Muhammad Samanhudi Anwar, SH sebagai Walikota Blitar dan Drs. Santoso, M.Pd sebagai Wakil Walikota Blitar pada tanggal 17 Februari 2016 pada periode masa jabatan 2016 sampai dengan 2021, maka sesuai dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

mewajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang berdasarkan oleh visi dan misi Kepala daerah tersebut. Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok.

RPJMD Kota Blitar periode tahun 2016-2021 merupakan hasil dari terjemahan visi dan misi kepala daerah yang terpilih pada periode 2016-2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005-2025. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009. Seperti yang dikutip pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2005, dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan “sharing” pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. Selain itu RPJMD juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti pada gambar 7.



Gambar 9. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Dokumentasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Blitar

Penyusunan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ini mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhitungkan sumberdaya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka visi misi pemerintah Kota Blitar tahun



2016-2021 adalah “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Proses dan tahapan dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

Tahapan dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran tiga tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seperti yang dikatakan oleh Ibu KA (P:42th)

“RPJMD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025. Jadi ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan Kota Blitar dan mengembangkan kesejahteraan khususnya. Pedomannya ya pembangunan Kota Blitar itu sendiri sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025, dan berbagai capaian pembangunan periode 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kota Blitar lima tahun kedepan, dan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2016-2021), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.” (Wawancara 17 Februari 2017 pukul 13.00, Bappeda Kota Blitar

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa RPJMD Kota Blitar tahun periode 2016-2021 lebih fokus pada aspek kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi pemerintah Kota Blitar yaitu “Masyarakat Kota Blitar Semakin

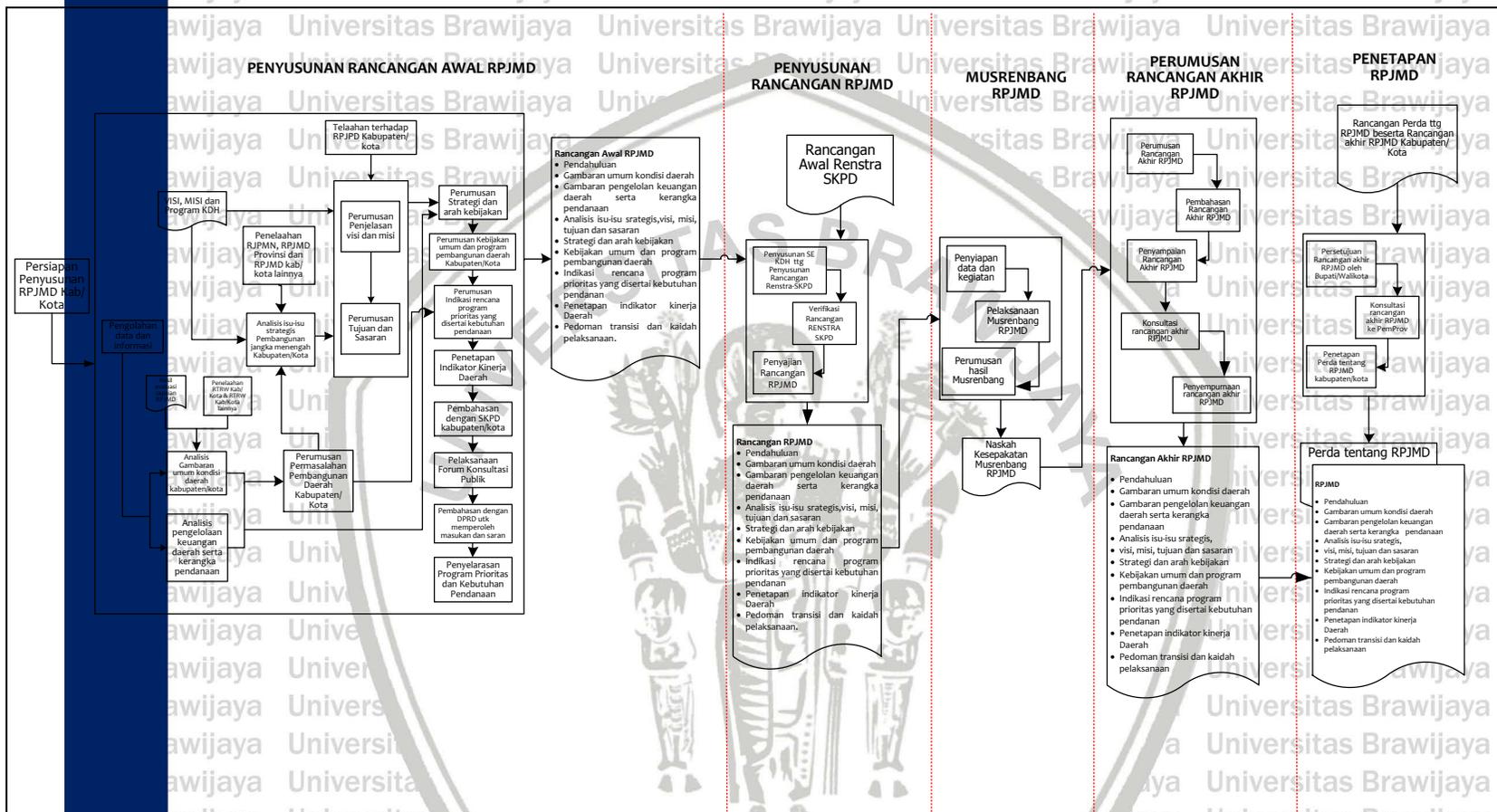
Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021". Dan visi tersebut diwujudkan dengan enam misi sesuai yang tertera dalam rancangan awal RPJMD

Kota Blitar yaitu antara lain.

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi.
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif.
5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.
6. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Dari ke enam misi yang telah dijabarkan terdapat empat misi yang berkaitan erat dengan aspek kesejahteraan masyarakat yaitu misi nomor 2,3,4,5.

Misi tersebut merupakan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar dan tercapainya visi yang telah ditetapkan. Visi misi tersebut juga akan memudahkan dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021.



Gambar 10. Langkah-langkah Penyusunan RPJMD

Sumber : *Permendagri Nomor 54 Tahun 2010*

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD sangat diperlukan tim penyusunan RPJMD yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintahan Kota Blitar beserta para staff nya. Hal ini dilakukan jauh sebelum proses penyusunannya dimulai. Seperti yang dikatakan oleh Ibu KA (p:42th) selaku staff Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Blitar yang juga bertanggung jawab dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021:

“Memang proses penyusunan RPJMD ini hanya diberi waktu 1 tahun. Mulai dari pembentukan tim sampai dengan diturunkannya Perda. Jadi kita sudah mulai bergerak dari hasil pemilihan umum keluar bulan Desember sudah kelihatan, jadi kira-kira dimulai bulan Januari 2016...” (wawancara pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 13.00 di Bappeda Kota Blitar)

Seperti yang dipaparkan pada wawancara diatas bahwa penentuan tim RPJMD dimulai pada Bulan pertama Tahun 2016. Tim Penyusun RPJMD Kota Blitar 2016-2021 dibentuk berdasarkan kebutuhan dan tupoksi dari setiap SKPD yang terkait sesuai dengan Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/91/HK/410.010.2/2016 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021. Adapun yang akan menjadi tugas Tim Penyusun RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Menyusun agenda kerja penyusunan RPJMD
2. Mengkumpulkan, mengkaji, menganalisa data, dan informasi
3. Menyiapkan Rancangan awal RPJMD
4. Menyusun rancangan awal RPJMD
5. Menyelenggarakan musrenbang RPJMD
6. Merumuskan rancangan akhir RPJMD
7. Mengusulkan penetapan rancangan akhir RPJMD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Blitar

8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka untuk mencapai keterpaduan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (satu tahunan) yang aspiratif dari seluruh masyarakat, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim RPJMD sesuai dengan Keputusan Walikota. Seperti yang dikatakan oleh Ibu RDS (p:35th).

“...Ya timnya dipilih oleh Bappeda kemudian diusulkan kepada Walikota terpilih. Sesuai dengan tugasnya. Jadi mereka yang bersangkutan masing-masing memiliki tugas masing-masing tetapi dalam tujuan yang sama yaitu menyusun dokumen perencanaan lima tahunan. Tugasnya berdasarkan aspek masing-masing. Ada yang aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Hal itu untuk mencapai indikator capaian kerja yang akan ditulis di dokumen perencanaan.” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 09.00 di Bappeda Kota Blitar)

Seperti hasil wawancara diatas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun RPJMD sebaiknya dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja). Pembagian tersebut dapat berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan

fungsi tim. Untuk Aspek Kesejahteraan Masyarakat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diketuai oleh Kepala Bidang Perencanaan Eksosbud Bappeda Kota Blitar yaitu Bapak P (L:50th)

“Saya dan rekan rekan yang bertugas dalam kelompok tim penyusun RPJMD bertanggung jawab dalam setiap indicator capaian kerja yang ditetapkan tentunya dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Agar sesuai dengan kondisi dan visi misi walikota Blitar.” (wawancara tanggal 20 Februari 2017 pukul 13.00 di Bappeda Kota Blitar)

b. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat data dan informasi yang diperoleh banyak dan dari berbagai pihak terkait. Seperti yang dikatakan oleh Ibu RDS (p:35th) selaku staff Bappeda Kota Blitar yang menangani aspek kesejahteraan masyarakat.

“...Kita sebagai tim memerlukan beberapa data terkait sekurang-kurangnya lima tahun terakhir, misalnya kalo aspek kesejahteraan masyarakat itu contohnya PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, IPM Kota Blitar, dll.” (wawancara pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 09.00, Bappeda Kota Blitar)

Hal ini ditambahkan oleh Bapak P (L:50th) yang juga membidangi aspek kesejahteraan masyarakat.

“...Jadi kita mulai pengumpulan data dan informasi itu dilakukan pada minggu pertama bulan Februari 2016. Data diperoleh dari berbagai sumber terkait seperti BPS, LSM, Pengusaha, serta dengan mengamati isu-isu strategis yang berada dalam masyarakat setempat. Pengumpulan data juga disesuaikan dengan kaitannya isu strategis serta visi dan misi pemerintah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kondisi Kota Blitar mulai dari Pertumbuhan Ekonomi sampai Indeks Pembangunan Manusia masyarakat Kota Blitar.” (wawancara tanggal 20 Februari 2017 pukul 13.00 di Bappeda Kota Blitar)

Dalam RPJMD Kota Blitar data yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat antara lain adalah :

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dimana besaran PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduknya.

Tabel 1. PDRB Perkapita Kota Blitar

Tahun 2011-2015

No.	TAHUN	PDRB PERKAPITA (Rp.000,-)	
		ADHB	ADHK
1.	2011	23.844,26	22.761,19
2.	2012	26.319,25	24.024,16
3.	2013	28.956,90	25.400,01
4.	2014	31.803,95	26.657,91
5.	2015	34.944,23	27.967,84

Sumber : BPS Kota Blitar

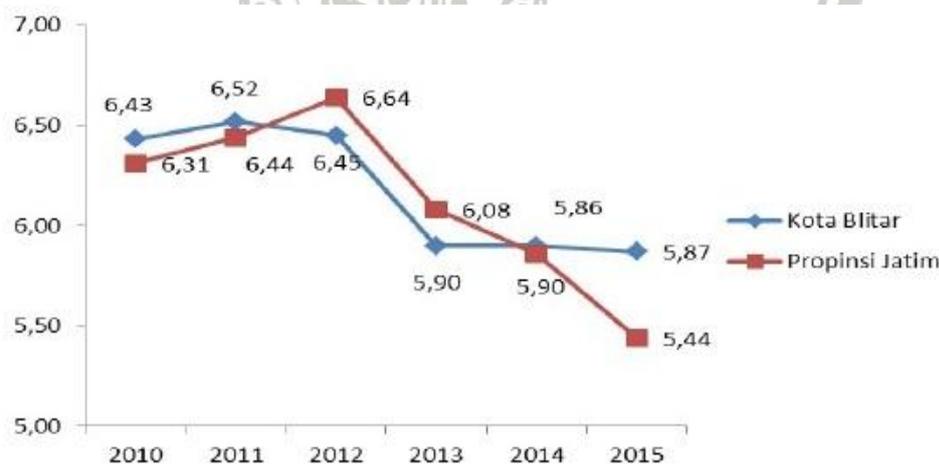


Seperti yang dikatakan oleh Ibu RDS (P:35th) bahwa PDRB ini dikelompokkan kedalam 9 sektor.

“...nilai PDRB itu ya dilihat dari banyak sektor seperti pertanian, pertambangan, industry pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa yang lain. Kita mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam aspek tersebut. Biasanya kita juga ambil dari BPS untuk hasil dari tahun-tahun terakhir.” (wawancara tanggal 20 Februari 2017 pukul 09.00 di Bappeda Blitar)

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Selain PDRB, pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Blitar. Jika dilihat dari grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar, pertumbuhannya tidak stabil karena sempat mengalami penurunan yang cukup banyak dari tahun 2012 ke tahun 2013.



Gambar 11. Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2011-2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016

Hal ini ditegaskan oleh wawancara dengan Bapak P (L:50th)



“...Memang jika dilihat pada grafik sempat mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Kalau tidak salah itu dipengaruhi oleh ekonomi ditingkat pusat juga. Jadi hal ini yang akan menjadi tantangan untuk menyusun perencanaan kedepannya bagaimana agar strateginya tepat sasaran.” (wawancara tanggal 20 Februari 2017 pukul 09.00 di Bappeda Blitar)

- Indeks Gini

Indeks gini digunakan untuk mengukur pemerataan pendapatan masyarakat Kota Blitar. Seperti yang disebutkan pada dokumen perencanaan Kota Blitar bahwa Pembangunan Daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonominya saja, namun disertai dengan peningkatan pemerataan pembangunan. Pengumpulan data mengenai Indeks Gini didapat dari Grafik oleh Badan Pusat Statistik Kota Blitar yang memaparkan nilai indeks gini Kota Blitar dari tahun 2011 sampai 2015 sebagai acuan untuk tahun-tahun berikutnya.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

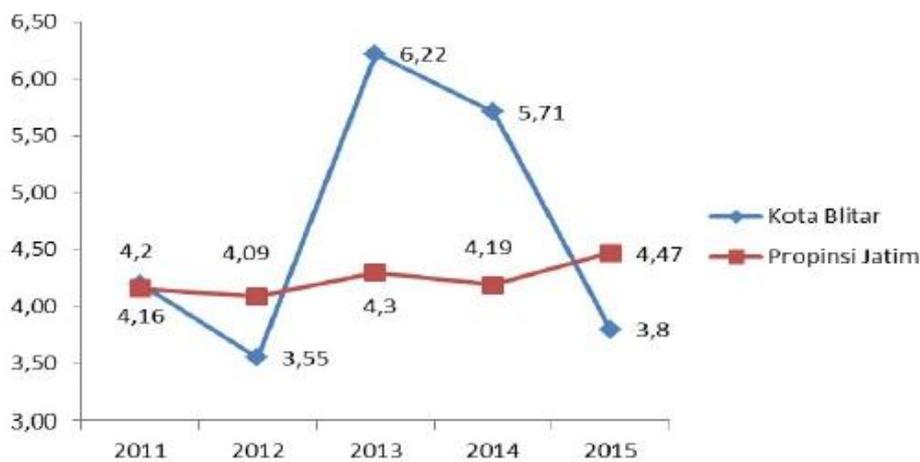
Dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ibu RDS (P:35th).

“...IPM itu dilihat dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran perkapita penduduk Kota Blitar. IPM digunakan untuk pengklarifikasian apakah Kota Blitar ini sudah layak disebut Kota maju atau masih berkembang, jadi semuanya berpengaruh terhadap kualitas hidup.” (wawancara tanggal 20 Februari 2017 pukul 09.00 di Bappeda Kota Blitar)

Berdasarkan hasil survey di lapangan, pengumpulan data IPM difokuskan pada angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Khusus untuk indeks pendidikan, metode lama perhitungan IPM menggunakan angka melek huruf dan di metode baru menggunakan angka harapan lama sekolah.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hampir disetiap daerah pengangguran menjadi masalah utama yang menyebabkan angka kemiskinan di Kota tersebut menurun. Berdasarkan data BPS Kota Blitar, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar relative fluktuatif. Data yang diperoleh rata-rata adalah hasil survey oleh Badan Pusat Statistik Kota Blitar dan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan.



Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2011-2015

Sumber : BPS Kota Blitar, 2016

- **Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan data BPS Kota Blitar tingkat kemiskinan Kota Blitar pada Tahun 2014 adalah 6,94%, sedangkan dilihat dari Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011, prosentase Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2015 adalah 10,09%.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Blitar Tahun 2011-2015

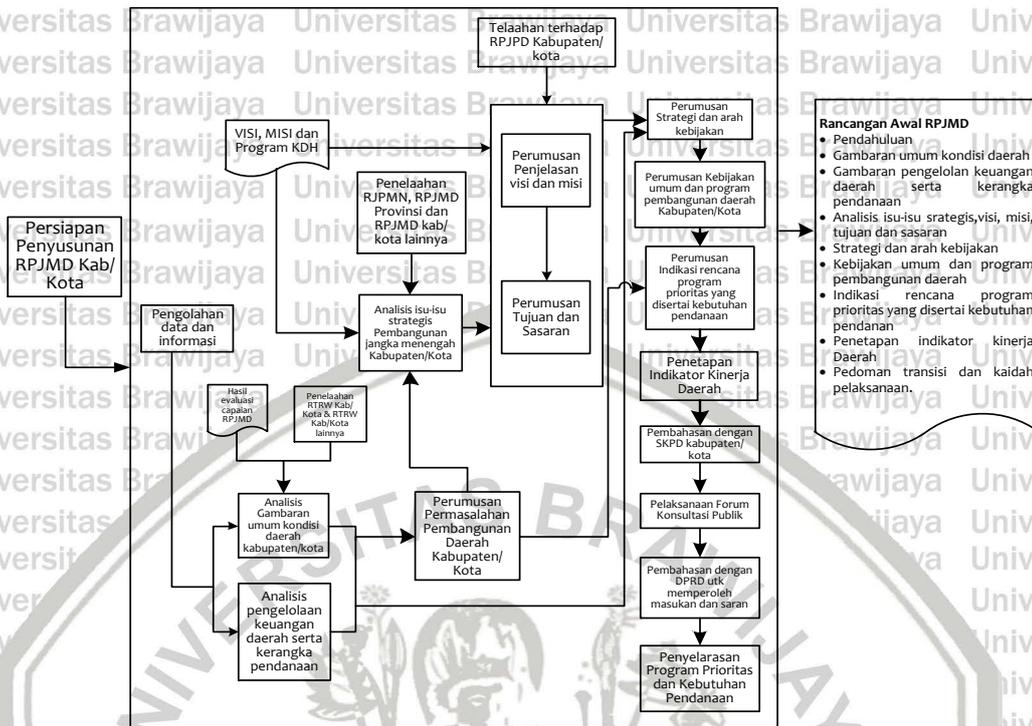
No	Tahun	Jumlah RTM	Jumlah KK	Prosentase RTM
1	2011	5.787	43.209	13,39%
2	2012	5.787	44.417	13,03%
3	2013	5.787	45.691	12,67%
4	2014	5.787	42.934	13,48%
5	2015	4.552	45.083	10,09%

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar, 2016

C. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Proses penyusunan RPJMD kota Blitar dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Perumusan rancangan awal RPJMD; dan
2. Penyajian rancangan awal RPJMD.



Gambar 13. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dapat disimpulkan dari gambar diatas bahwa dalam proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD melalui beberapa tahap. Dimulai dari pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang dilakukan selama tiga bulan dan selanjutnya adalah proses pembahasan dan kesepakatan yang berlangsung selama kurang lebih dua minggu. Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Blitar melibatkan beberapa elemen masyarakat seperti Konsultasi Publik oleh beberapa LSM, Pengusaha, akademisi, instansi vertical, wartawan dan lain-lain. Proses ini juga melibatkan SKPD terkait yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.



D. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Dalam Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Tujuan musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJM Daerah menjadi rancangan akhir RPJMD. Musrenbang RPJMD Kota Blitar digelar pada tanggal 13 Maret 2016.



Gambar 14. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Blitar

Sumber. Dokumentasi Bappeda Kota Blitar

Hal ini ditegaskan oleh Ibu KA (P:42th) selaku staff Bappeda Kota

Blitar, bahwa :

“...Memang dalam aturannya proses dari perumusan awal sampai diadakannya musrenbang itu 2 bulan saja. Tetapi kemaren kita menggelar musrenbang pertama bulan maret akhir tahun 2016 untuk membahas hasil rancangan awal RPJMD Kota Blitar yang sudah disusun kurang lebih 2,5 bulan.” (wawancara pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 13.00, di Bappeda Kota Blitar)



Gambar 15. Peserta Musrenbang RPJMD Kota Blitar

Sumber. Dokumentasi Bappeda Kota Blitar

Seperti pada gambar 12 bahwa pelaksanaan Musrenbang Kota Blitar tahun 2016-2021 dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, kepala bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kepala SKPD kabupaten/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan. Tujuan diadakannya

musrenbang RPJMD Kota Blitar menurut Ibu KA (P:42th) adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD antara lain mencakup :

1. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
2. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
5. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD; dan
6. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah.

E. Perumusan Rancangan Akhir

Setelah diadakannya Musrenbang untuk membahas rancangan awal RPJMD dengan segala kesepakatan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya dalam proses penyusunan RPJMD adalah Perumusan Rancangan Akhir RPJMD.. Penyajian rancangan akhir RPJMD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Rancangan akhir RPJMD Kota Blitar secara substansi sudah mencakup hal-hal seperti berikut.

Pada bab Pendahuluan RPJMD Kota Blitar lebih menjelaskan bagaimana penyusunan RPJMD secara teoritikal dalam latar belakang dijelaskan bagaimana maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Blitar, dasar hukum, dan hubungan RPJMD dengan dokumen lainnya seperti RPJPD Kota Blitar tahun 2005-2025, RTRW Kota Blitar, RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Pembangunan Sektoral, serta sistematika penulisannya.

Dalam arah dan strategi pada bab pendahuluan ini sudah banyak menyangkut tentang bagaimana kesejahteraan terpenuhi dari segala bidang seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur untuk menunjang pelayanan masyarakat.

Pada Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah dijelaskan tentang keseluruhan keadaan Kota Blitar dilihat dalam seluruh aspek. Pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dijelaskan data tentang Pertumbuhan PDR, Pertumbuhan Ekonomi, serta Indeks Gini. Sedangkan pada fokus kesejahteraan social dijelaskan data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kerawanan Sosial, Produk Hukum Daerah. Data keseluruhan tersebut diambil dari data data pada tahun sebelumnya yang terdapat dalam RPJMD tahun 2011-2015 sebagai pembanding atau pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Pada bab Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan menjelaskan tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun). Pada bab ini dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Blitar dalam kurun waktu 2011-2015 tergolong masih sangat rendah, terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 10,01%-15,74%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantngan Kota Blitar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi jawa timur masih cukup tinggi.

Pada bab Analisis Isu Strategis menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal. Yang menjadi isu dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Blitar dalam penyusunan program pembangunan daerah terkait aspek kesejahteraan masyarakat adalah antara lain peningkatan daya saing daerah yang berbasis pada peningkatan produktivitas rakyat dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pada bidang pendidikan masih perlu peningkatan pada perluasan dan pemerataan pendidikan formal. Sedangkan pada bidang kesehatan terdapat permasalahan terkait masih rendahnya sinergitas pelayanan dalam perawatan kehamilan dan kelahiran, perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepatuhan ibu dalam menjaga kesehatannya, masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular disebabkan oleh masih buruknya perilaku di masyarakat dalam mengikuti Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), perluasan akses kesehatan masyarakat pada berbagai sarana kesehatan dasar masih perlu ditingkatkan.

Pada bab Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran adalah memasukkan masalah kesejahteraan masyarakat dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Visi pemerintah Kota Blitar adalah **“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat**

Pada Tahun 2021”. Secara garis besar dapat dilihat bahwa tujuan pembangunan kota Blitar adalah untuk menyejahterakan masyarakat melalui APBD Pro Rakyat Jilid II “One For All, All For One” yang dimaknai dimana satu untuk semua semua untuk satu adalah masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan

daerah dan seluruh hasil pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat 6 misi antara lain adalah :

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif
5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso
6. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Jika dilihat dari keenam visi Kota Blitar yang sesuai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah visi ke 2, 3, 4, dan 5. Karena dalam misi tersebut dilakukan untuk perwujudan kesejahteraan melalui Kualitatif SDM, Kemandirian Ekonomi, Kesehatan Masyarakat, serta Keharmonisan Sosial.

Pada bab Strategi dan Arah Kebijakan menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 tahun. Sesuai dengan aspek kesejahteraan masyarakat strategi yang akan dilakukan antara lain

1. Menguatkan kerukunan umat beragama
2. Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
3. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
4. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga
5. Meningkatkan pemberdayaan pengembangan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
6. Meningkatkan Iklim Ekonomi Kondusif
7. Meningkatkan kondisi ketahanan pangan
8. Mengembangkan ekonomi kreatif
9. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat
10. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
12. Meningkatkan pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup secara terpadu
13. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan, dan perhubungan secara memadai dan merata
14. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan
15. Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera
16. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan air bersih, sanitasi dan permukiman sehat.
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana
18. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah melalui penegakan hukum

secara tegas

19. Meningkatkan fasilitasi partai politik dan pembinaan organisasi

kemasyarakatan

20. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak

21. Penguatan budaya dan kearifan local

22. Meningkatkan profesionalisme birokrasi

23. Memantapkan kualitas layanan pemerintah

Pada Bab Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah menjelaskan tentang uraian hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target pencapaian indikator kerja. Misalnya saja kebijakan umum untuk strategi meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian, mengembangkan ekonomi kreatif, peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan secara merata, layanan kesehatan, layanan pendidikan, serta peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pada bab indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjelaskan tentang hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Pada bab penetapan indikator kinerja daerah menjelaskan tentang

penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Pada bab terakhir dalam RPJMD Kota Blitar adalah pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan yang memuat pedoman bagaimana mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan yang dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

F. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Dalam proses terakhir sebelum ditetapkannya sebagai perda, RPJMD yang sudah siap disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. RPJMD Kota Blitar disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016-2021 pada tanggal 22 Agustus 2016.

Setelah ditetapkan, RPJMD telah sah menjadi dokumen perencanaan pembangunan di Kota Blitar dan juga menjadi tujuan bersama masyarakat Kota Blitar untuk menuju Kota Blitar yang lebih sejahtera.

2. Aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

Pada proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tentunya terlibat banyak aktor dan stakeholder yang ikut berperan serta. Sesuai dengan Keputusan Walikota Blitar nomor : 188/91/HK/410.010.2/2016 tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021, maka sudah terbentuk tim inti dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar. Pada aspek kesejahteraan masyarakat dikerjakan oleh kelompok kerja bidang ekonomi, social dan budaya yang diketuai oleh Bapak Parminto, S.Sos, M.Si dan kelompok kerja bidang pemerintahan dan kesra yang diketuai oleh Bapak Purwanto, AP dengan rincian terlampir.

Dalam pelaksanaan proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tidak hanya tim yang sesuai dengan Keputusan Walikota Blitar nomor : 188/91/HK/410.010.2/2016 saja yang terlibat. Masih banyak aktor lain yang ikut serta dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar seperti.

a. Kepala Daerah Kota Blitar

Walikota dan Wakil Walikota merupakan kepala pemerintahan. Pada dasarnya, Walikota bersama Wakil Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Di Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar, S.H. M.M dan Drs. Santoso, M.Pd merupakan walikota dan wakil walikota terpilih untuk periode 2016-2021 pada tanggal 1 Februari 2016. Sebagaimana amanat dalam

Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan periode jabatannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (lima tahunan).

Berangkat dari data dan informasi saat ini serta analisis isu-isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan potensi sumberdaya dan faktor strategis yang dimiliki oleh masyarakat Kota Blitar, maka Pemerintah Kota Blitar mempunyai visi yaitu “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”. Berdasarkan visi yang akan dicapai Pemerintah Daerah khususnya Kepala daerah wajib untuk membuat dokumen perencanaan sesuai dengan visi misinya. Jika dilihat dari visinya, Walikota Blitar memprioritaskan kesejahteraan masyarakat melalui program APBD Pro Rakyat yang juga sudah ditetapkan dalam periode sebelumnya. Program APBD Pro Rakyat pada periode saat ini adalah jilid II dengan lima misi sesuai dengan RPJMD Kota Blitar yaitu mewujudkan masyarakat kota Blitar yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Rukun agawe santoso.



Gambar 16. Sosialisasi APBD Pro Rakyat Jilid II

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Blitar

b. Sekretaris Daerah Kota Blitar

Penyusunan RPJMD Kota Blitar melibatkan Sekretaris Kota Blitar sebagai Penanggung Jawab dalam proses. Drs. Rudy Wijonarko, M.Si adalah Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Kota Blitar yang saat itu bertugas sebagai pegawai serta penanggungjawab terhadap segala proses perumusan dan penyusunan RPJMD Kota Blitar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
- 4) pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah ; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bappeda Kota Blitar

RPJMD mencakup dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan tupoksi dari SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Oleh karena itu Bappeda yang sebagian besar melakukan proses penyusunan RPJMD di bawah Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. Kepala Bappeda, Drs. Ec. Priyo Istanto bertugas sebagai Ketua Tim penyusunan RPJMD Kota Blitar sesuai dengan surat keputusan walikota nomor: 188/91/HK/410.010.2/2016.

d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Oleh karena itu, PPKD bertindak sebagai bendahara dalam proses penyusunan RPJMD. Karena dalam rancangan perencanaan pembangunan

terdapat rencana anggaran pemerintah yang juga harus disusun dalam bab 3 yaitu Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan. PPKD Kota Blitar yang juga menjadi Plt. Sekretaris Daerah Kota Blitar saat itu juga bertindak sebagai Wakil Ketua dalam Tim Penyusunan RPJMD.

e. Sekretaris Bappeda Kota Blitar

Sekretaris Bappeda Kota Blitar bertindak sebagai sekretaris dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021. Bapak Suharmanu, ST selaku sekretaris Bappeda Kota Blitar bertindak dalam segala kegiatan yang terjadi selama proses berlangsung dari awal pembentukan tim sampai dengan penetapan perda mengenai RPJMD misalnya masalah pemberkasan dokumen-dokumen terkait maupun undangan-undangan rapat yang berkaitan dengan kegiatan.

f. Kepala Dinas SKPD yang terkait di Kota Blitar

Seperti yang telah disebutkan pada table tim penyusun RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar nomor : 188/91/HK/410.010.2/2016 bahwa sebagian anggota tim merupakan kepala dinas SKPD lain atau kepala bidang SKPD lain yang terkait dengan isi maupun fokus tertentu dalam RPJMD Kota Blitar. SKPD lain yang terlibat antara lain adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Setda Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Inspektorat Kota Blitar, Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informasi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kota Blitar, dan Badan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan fokus dan tupoksi setiap SKPD dibagi kedalam setiap aspek sesuai dengan profesinya.

g. Anggota staff setiap bidang terkait pada Bappeda Kota Blitar

Sebagian besar anggota staff pada setiap bidang di bappeda Kota Blitar berperan dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar. Mereka dikelompokkan sesuai kelompok kerja pada aspek yang berbeda sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Blitar nomor : 188/91/HK/410.010.2/2016. Pada aspek kesejahteraan masyarakat dikerjakan oleh kelompok kerja bidang ekonomi, sosial dan budaya serta kelompok kerja bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

h. Anggota DPRD Kota Blitar

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan penting terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. DPRD yang sebelumnya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kini berubah menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016-2021 juga merupakan salah satu perda yang juga diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Blitar. Dalam fungsinya DPRD mendampingi proses penyusunan RPJMD Kota Blitar dalam setiap Musrenbang Rancangan Awal sampai tahap akhir penetapan Perda.

i. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar juga tidak lepas dari peran masyarakat. Seperti wawancara pada Ibu KA (p:42th).

“...tentu masyarakat sangat terlibat dalam proses penyusunan RPJMD mulai dari proses pengumpulan data dan informasi, workshop, musrenbang, sampai penetapan perda masyarakat terlibat. Masyarakat yang terlibat dalam RPJMD Kota Blitar ini ada LSM, Pengusaha, Akademisi (Unitomo), Instansi vertikal (BPS, BPN, KPP), dan juga wartawan. Masyarakat ini disesuaikan dengan keterkaitan RPJMD Kota Blitar dan tujuannya supaya nantinya rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang dimaksudkan oleh masyarakat.”
(wawancara tanggal 17 Februari 2017 pukul 13.00 di Bappeda Kota Blitar)

C. Analisis Data

1. Proses dan tahapan dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD

Pada tahap pertama dalam proses penyusunan RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 adalah pembentukan tim

penyusun RPJMD. Pada Kota Blitar pembentukan tim penyusun RPJMD dilakukan setelah hasil Pilkada keluar pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Tim penyusun terdiri dari 48 orang baik dari bappeda maupun dari skpd terkait lainnya.

b. Pengumpulan Data dan Informasi

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan atau RPJMD menggunakan beberapa pendekatan seperti yang diungkapkan oleh Kuncoro (2012:25) bahwa

Perencanaan pembangunan dapat dibagi kedalam tiga jenis perencanaan, yaitu berdasarkan proses, dimensi pendekatan dan jangkauan jangka waktu. Ketiga jenis perencanaan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar 2016-2021 adalah sebagai penyempurna agar menghasilkan rencana pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan antara kegiatan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan tersebut meliputi teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas sebagai perencana pembangunan, jika di daerah yaitu Bappeda. Pendekatan partisipatif adalah proses perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Langkah ini teraktualisasi melalui kegiatan konsultasi public yang telah dilakukan

oleh Bappeda Kota Blitar sejak pengumpulan data. Selanjutnya pendekatan top-down, dan bottom-up adalah proses perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Konkretnya terlaksana dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat RT/RW hingga tingkat Kota.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan analisa terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Blitar sebelum melakukan penyusunan perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pasal 33 ayat 3. Data-data terkait serta isu strategis yang sesuai dengan visi dan misi dikumpulkan mulai dari periode sebelumnya yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Data sebelumnya didapat dari berbagai sumber seperti BPS, LSM, Pengusaha, serta dengan mengamati isu-isu strategis yang terjadi pada masyarakat setempat. Pada pengumpulan data dan informasi juga memperhatikan RPJMD pada periode sebelumnya dan landasan hukum yang terkait. Dalam aspek kesejahteraan masyarakat data yang terkait adalah fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang terdiri dari pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan fokus kesejahteraan social yang terdiri dari indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat kemiskinan.

c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Proses penyusunan dokumen perencanaan sangat berhubungan dengan teori perencanaan oleh Kuncoro (2012:49) bahwa didalam penyusunan dibutuhkan empat fungsi manajemen yang saling terkait yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan. Dalam rancangan awal RPJMD dibutuhkan pemahaman dimana posisi daerah dan kemana mau melangkah. Untuk itu visi misi serta strategi Kepala Daerah sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembangunan daerah. Kuncoro (2012:49) menyebutkan bahwa:

Merencanakan (*to plan*) membutuhkan pemahaman dimana posisi daerah dan kemana mau melangkah ke depan, bagaimana formulasi visi dan misi, serta strategi apa yang dipilih untuk mencapai target. Mengorganisasikan (*to organize*) adalah bagaimana pemimpin daerah mengelola semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Mengarahkan (*to direct*) adalah bagaimana pemimpin mengarahkan sumber daya agar mencapai visi, misi, dan target yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan memberi motivasi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Mengendalikan (*to control*) merupakan fungsi terakhir yang intinya mengevaluasi dan melaporkan kinerja organisasi dan daerahnya.

Pada Kota Blitar, proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD melalui beberapa tahap. Dimulai dari pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang dilakukan selama tiga bulan dan selanjutnya adalah proses pembahasan dan kesepakatan yang berlangsung kurang lebih dua minggu sebelum diadakannya Musrenbang. Penyusunan RPJMD Kota Blitar 2016-2021

menggunakan pendekatan politik sebagai prioritas. Artinya perencanaan pembangunan lima tahun kedepan sejak tahun 2016 yang dirancang berasal dari proses politik.

d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar, pelaksanaan musrenbang sangat berpengaruh. Musrenbang diperlukan sebagai perwujudan partisipatif upaya menyelaraskan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Penyusunan RPJMD bukanlah untuk kepentingan tertentu, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat Kota Blitar semakin sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang SPPN terdapat satu pendekatan dalam proses perencanaan yang dinamakan proses partisipatif. Proses partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembagunan (*stakeholder*) yang antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang.

Pelaksanaan musrenbang RPJMD di Kota Blitar dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2017 bertempat di Balai Kota Kusuma Wicitra untuk membahas rancangan awal dari RPJMD Kota Blitar yang telah disusun oleh Tim berdasarkan data dan isu-isu strategis yang telah diperoleh. Musrenbang tidak hanya dihadiri oleh jajaran eksekutif, tetapi seluruh elemen legislative dan anggota Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), lembaga-lembaga swasta, para pimpinan partai politik, para tokoh agama, serta para tokoh masyarakat yang jumlahnya mencapai

215 orang.

Dalam pelaksanaannya, DPRD Kota Blitar memberikan 2 catatan terkait RPJMD Kota Blitar 2016– 2021 yang di ajukan ke DPRD. Yang pertama adalah terkait misi nomor 1 tentang aktualisasi nilai-nilai religius dan misi nomor 3 yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi kreatif. Yang menjadi sorotan adalah misi yang di singgung oleh Walikota hanya soal koperasi padahal cakupan ekonomi kreatif lebih luas seperti arsitektur, desain, game dan software yang tidak pernah disentuh pemerintah Kota Blitar padahal produk kreatif seperti itu sangat berkembang di kota Blitar.

e. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir ini didasarkan pada berita acara hasil kesepakatan musrenbang dengan segala perbaikan untuk kesepakatan akhir. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada menteri untuk rancangan akhir RPJMD Provinsi dan kepada Gubernur untuk rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota. Secara substansial RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 telah membahas masalah

kesejahteraan masyarakat mulai dari Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi hingga Fokus Kesejahteraan Sosial.

f. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Proses terakhir merupakan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dokumen perencanaan dalam jangka waktu lima tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 disampaikan oleh Walikota Blitar dengan visi “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021” dengan tema “One for All, All for One”. RPJMD kemudian disampaikan kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dengan rincian seperti berikut.

Pada tahun pertama 2016 arah kebijakan pembangunan adalah penguatan ekonomi kreatif menuju pencapaian kesejahteraan rakyat. Pada tahun kedua 2017 arah kebijakan pembangunan Kota Blitar singkat – padat – tapi menuntut kemampuan implementasi yang penuh inovasi tinggi dari jajaran birokrasi. Pada tahun ketiga 2018 kebijakan pembangunan Kota Blitar diarahkan pada pengembangan perekonomian rakyat berbasis sumber daya local untuk meningkatkan daya saing. Pada tahun keempat 2019 kebijakan pembangunan diarahkan kepada penguatan untuk mencapai kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan, didukung masyarakat yang unggul dan kreatif. Pada tahun selanjutnya 2020 adalah pemantapan daya saing ekonomi daerah yang didukung manajemen SDM dan profesionalisme aparatur. Tahun keenam 2021, masa

jabatan Walikota-Wakil Walikota terpilih berakhir pada tanggal 17 Februari. Pada tahun ini juga berakhir masa perda tentang RPJMD Kota Blitar.

Pada tanggal 22 Agustus 2016 RPJMD Kota Blitar telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016-2021. Perda ini nantinya akan menjadi patokan dan pedoman arah kebijakan dalam lima tahun yang akan datang.

2. Peran aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penyusunan sampai dengan penetapan RPJMD tentu terdapat aktor-aktor yang terlibat. Dalam proses perumusan kebijakan terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan terkait dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Anderson dan Lindnlom dalam (2016:65) terdapat dua kelompok aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yaitu aktor resmi dan aktor tidak resmi. Aktor resmi terdiri dari eksekutif, legislative dan yudikatif, sedangkan aktor tidak resmi terdiri dari partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara individu.

Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, aktor-aktor yang terlibat terdiri dari aktor resmi yaitu Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah, Bappeda, semua SKPD yang terkait, dan anggota DPRD Kota Blitar. Sedangkan aktor tidak resmi terdiri dari lapisan masyarakat seperti LSM, Pengusaha, Akademisi (Unitomo), Instansi vertikal (BPS, BPN, KPP), dan juga wartawan.

a. Kepala Daerah Kota Blitar

Terpilihnya Bapak Muhammad Samanhudi Anwar, S.H. M.M dan Drs. Santoso, M.Pd sebagai Walikota dan Wakil Walikota di Kota Blitar maka harus ditetapkan RPJMD selama 6 bulan setelah pelantikan, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program dari Samanhudi dan Santoso selama satu periode pemerintahan yang diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya APBD Pro Rakyat Jilid II dengan konsep One For All-All For One, pemerintah Kota Blitar berupaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam beberapa aspek seperti contohnya kebijakan sekolah gratis bagi masyarakat Kota blitar guna meningkatkan IPM Kota Blitar.

Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2016-2021, visi Walikota M. Samanhudi Anwar berpasangan dengan Wakil Walikota Drs. Santoso, M.Pd adalah Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021. Visi yang hanya terdiri dari 12 kata tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi, meliputi:

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan Berdaya Saing Tinggi.
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif.

5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.

6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

b. Sekretaris Daerah Kota Blitar

Penyusunan RPJMD Kota Blitar melibatkan Sekretaris Kota Blitar sebagai Penanggung Jawab dalam proses. Drs. Rudy Wijonarko, M.Si adalah Plt (Pelaksana Tugas) Sekretaris Kota Blitar yang saat itu bertugas sebagai pegawai serta penanggungjawab terhadap segala proses perumusan dan penyusunan RPJMD Kota Blitar.

c. Kepala Bappeda Kota Blitar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kota Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat

terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Yang bertanggung jawab sebagai Ketua dalam proses penyusunan RPJMD adalah Kepala Bappeda yaitu Bapak Drs. Ec. Priyo Istanto. Dalam pengerjaannya terdapat tiga cara Bappeda mengerjakan RPJMD, pertama dilakukan dengan dipihakketigakan atau ditenderkan, kedua dikerjakan oleh Bappeda sendiri, dan yang ketiga dikerjakan oleh Bappeda namun melibatkan bantuan dari tenaga ahli. Penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dilakukan dengan cara ketiga yaitu Bappeda mengerjakan sendiri namun melibatkan bantuan dari beberapa akademisi serta aktor-aktor terkait lainnya. Berbagai program kegiatan khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat diarahkan kepada seluruh SKPD terkait untuk mencapai kondisi meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat. Serta semakin kondusifnya lingkungan kehidupan sosial masyarakat,, yang kesemuanya harus bisa dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai bendara dalam proses penyusunan RPJMD. Karena dalam rancangan perencanaan pembangunan terdapat rencana anggaran pemerintah yang juga harus disusun dalam bab 3 yaitu Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan. PPKD

Kota Blitar yang juga menjadi Plt. Sekretaris Daerah Kota Blitar saat itu juga bertindak sebagai Wakil Ketua dalam Tim Penyusunan RPJMD.

e. Sekretaris Bappeda Kota Blitar

Sekretaris Bappeda Kota Blitar bertindak sebagai sekretaris dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021. Bapak Suharmanu, ST selaku sekretaris Bappeda Kota Blitar bertindak dalam segala kegiatan yang terjadi selama proses berlangsung dari awal pembentukan tim sampai dengan penetapan perda mengenai RPJMD misalnya masalah pemberkasan dokumen-dokumen terkait maupun undangan-undangan rapat yang berkaitan dengan kegiatan.

f. Kepala Dinas SKPD yang terkait di Kota Blitar

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan Jangka Menengah.

Kepala Dinas SKPD yang terlibat dalam tim penyusun RPJMD Kota Blitar antara lain adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Setda Kota Blitar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Inspektorat Kota Blitar, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan Kota Blitar, dan Badan Lingkungan Hidup.

g. Anggota Staff setiap bidang terkait pada Bappeda Kota Blitar

Sebagian besar aktor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar adalah Bappeda Kota Blitar, sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda yaitu pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh karena itu seluruh besar kepala bidang, kepala sub bidang, maupun staff atau karyawan Bappeda Kota Blitar terlibat dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar. Anggota staff Bappeda Kota Blitar dibagi dalam lima kelompok kerja dan disesuaikan dengan masing-masing bidang.

h. Anggota DPRD

DPRD beserta Walikota Blitar sepakat bahwa RPJMD adalah hal strategis yang harus segera disepakati bersama. Dukungan DPRD Kota Blitar dilihat dari pimpinan dewan yang hadir lengkap saat Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Walikota Blitar atas Raperda RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021. Pada proses penyusunan ini Anggota DPRD juga berperan dalam penetapan Perda RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021. Meskipun Perda telah ditetapkan, ternyata masih ada dua catatan dan berkaitan dengan aspek kesejahteraan

masyarakat yaitu upaya untuk mencapai misi ketiga yang berhubungan dengan Ekonomi kreatif yang dinilai masih belum jelas. Acuannya hanya pada Dinas Koperasi dan UKM yang ditargetkan untuk mencetak pengusaha baru dari angka 13.000 orang pelaku UMKM menjadi 13.300 orang. Padahal masih banyak domain ekonomi kreatif yang bisa dijadikan bahan baku program kegiatan oleh jajaran SKPD terkait untuk menyusun program dan kegiatan agar mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan peluang kerja. Anggota DPRD juga menilai bahwa SKPD yang masih timpang dan belum mampu sepenuhnya memahami visi misi Walikota yang luar biasa bagus sebenarnya.

Menurut pengalaman dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rencana anggaran yang diajukan SKPD masih terdapat paradigm lama, *copy pastedari* kegiatan-kegiatan sebelumnya. Contohnya dalam setiap pembahasan APBD selalu diminta data warga miskin, namun hingga akhir tahun 2016 data warga miskin yang diminta tersebut belum ada.

i. Masyarakat

Secara konseptual dan teknokratis, proses pembangunan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan utama pembangunan yang ditetapkan yaitu mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap, berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, pembangunan kota sebaiknya dikelola secara efektif, efisien dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan melibatkan *stakeholder* dan lapisan masyarakat. Tugas dan fungsi strategis ini hanya dapat terwujud jika proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang

transparan, responsive, terukur, komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang dimiliki Kota Blitar.

Masyarakat Kota Blitar sangat berperan penting dalam proses penyusunan RPJMD seperti yang dikatakan oleh Kuncoro (2012:31) tentang perencanaan partisipatif yang mengutamakan aspirasi dan keinginan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang terlibat dalam RPJMD Kota Blitar ini ada LSM, Pengusaha, Akademisi (Unitomo), Instansi vertikal (BPS, BPN, KPP), dan juga wartawan. Masyarakat ini disesuaikan dengan keterkaitan RPJMD Kota Blitar dan tujuannya supaya nantinya rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang dimaksudkan oleh masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat dan forum-forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan masih perlu ditingkatkan baik akses maupun ruang lingkungannya. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan. Semua SKPD yang dikoordinir PPID harus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mempublikasikan data berbagai dokumen secara periodik agar mudah diakses oleh masyarakat umum.

Maka, optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) untuk merumuskan road map dan mekanisme keterbukaan informasi publik bagi seluruh

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar menjadi isu strategis. Isu lain adalah terkait dengan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat. Akses dan ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan melalui dengar

pendapat masyarakat (public hearing) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Renperda RAPBD dan non APBD masih perlu ditingkatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisa, maka dapat disimpulkan beberapa point sesuai dengan fokus yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kesimpulan yang dibuat oleh penulis antara lain :

- 1) Proses dan tahapan dalam penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021 dalam aspek kesejahteraan masyarakat meliputi pembentukan tim penyusun RPJMD, pengumpulan data dan informasi, penyusunan rancangan awal RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Proses ini dimulai sejak bulan Desember setelah hasil Pilkada diumumkan dan berakhir pada 22 Agustus 2016 pada saat penetapan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016-2021.
- 2) Secara substansi RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 telah berisi aspek kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi nya “Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada 2021” yang merupakan lanjutan program jilid kedua dari APBD Pro Rakyat. Visi ini fokus dalam aspek kesejahteraan masyarakat dilihat berdasarkan lima dari enam misinya merupakan strategi untuk kesejahteraan masyarakat Kota

Blitar. Walaupun dalam proses penyusunannya masih kurang terkait data pada tahun tahun sebelumnya.

- 3) Keterlibatan para aktor sudah cukup baik mulai dari aktor resmi serta aktor tidak resmi. Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, aktor-aktor yang terlibat terdiri dari aktor resmi yaitu Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah, Bappeda, semua SKPD yang terkait, dan anggota DPRD Kota Blitar. Sedangkan aktor tidak resmi terdiri dari lapisan masyarakat seperti LSM, Pengusaha, Akademisi (Unitomo), Instansi vertikal (BPS, BPN, KPP), dan juga wartawan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas, maka saran yang akan diajukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Pada misi ketiga yang berhubungan dengan Ekonomi kreatif yang dinilai masih belum jelas. Perlu ditambahkan tentang domain ekonomi kreatif yang bisa dijadikan bahan baku program kegiatan oleh jajaran SKPD terkait untuk menyusun program dan kegiatan agar mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan peluang kerja.
- 2) Walaupun secara substansi sudah berisi tentang aspek kesejahteraan masyarakat. Tim penyusun RPJMD perlu Melengkapi data-data pada tahun-tahun sebelumnya agar memudahkan dalam proses penyusunan

terutama dalam penentuan target dan sasaran RPJMD periode selanjutnya.

Hal ini juga berlaku untuk aspek-aspek yang lain.

- 3) Perlunya peningkatan koordinasi, dan memperjelas peranan masing-masing aktor yang terlibat. Diharapkannya agar setiap SKPD terkait Kota Blitar melakukan analisis yang sesungguhnya terhadap program yang disusun. Agar ada perubahan atau inovasi strategi yang baru dari periode sebelumnya terhadap aspek kesejahteraan masyarakat ataupun dalam aspek yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A.T. Mosher, 1987. *Menggerakkan Dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasaguna.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019*.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016. *Perkembangan Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2011-2015*.

Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016. *Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2011-2015*.

Biro Pusat Statistik Indonesia. 2000. *Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Wilayah*.

Bryant, Coralie dan White, Louise G. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Dialihbahasakan oleh Rusyanto L. Simatupang. Jakarta : LP3ES.

Conyers dan Hill. 1984. *Perencanaan social di dunia ketiga* (Terjemahan) Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dipoyudo, Kirdi. 1984. *Keadilan Sosial*. Jakarta : CSIS.

Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Henry, Nicholas. 2010. *Public Administration and Public Affairs*. 11th edition. New York: Longman-Pearson.

Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo.

Kotler, Philip dan Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran, Jilid I, Edisi Kedua belas*, PT. Indeks, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2012, *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*, Jakarta, Salemba Empat.

Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan : Pendekatan Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Mohd, Ahmad Shukri dan Yusoff, Rosman Md. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi, & Isu Pembangunan*. Malaysia : Universitas Teknologi Malaysia.

Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah (Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah)*. Grasindo: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. *Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. *Tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005.

Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2016-2021

Rustiadi, Ernan. Saefulhakim, Sunsun dan Panuju, Dyah R. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Crestpent Press.

Saraswati, 2010. *Kearifan Budaya Lokal Dalam Perspektif Teori Perencanaan*. Bandung.

Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.

-----, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabete.

Suharto, Edi, 2004, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi*, Malang.

Sumaatmaja, Nursid. 1988. *Geografi pembangunan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi.

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang : Universitas Negeri Malang.

Susetiawan. 2009. *Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat : Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*.

Syafri. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.

Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014. *Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia (sebuah pengantar dan panduan)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Wrihatnolo, Randy R dan Nugroho, Riant D. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.